

MODUL 5

PEMBANGUNAN

KELUARGA



Revisi
2022





MODUL 5

PEMBANGUNAN KELUARGA

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Tahun 2022



Hak Cipta @ 2022

PERANGKAT
TRAINING OF TRAINER (ToT)
PELATIHAN FUNGSIONAL DASAR (LFD)
PENYULUH KELUARGA BERENCANA

Edisi Tahun 2022

PEMBANGUNAN KELUARGA

Tim Penyusun Pejabat Fungsional :

Khaeri Marifah, M.Psi.T
Firma Novita, S.IP., M.Si
Mila Astari Songan, S.Psi, MM

Pengarah :

Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si
Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si
Uswatun Nisa, S.Sos, MAPS

Pelaksana Teknis :

Desnita Ekaratri Wulandari, SS., MPH
Iwan Tri Hariyanto, SPd

Tim Editor :

Tri Aryadi, S.Psi
Sri Agustien, SE

Diterbitkan oleh :

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KB
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Jl. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650

KATA SAMBUTAN



Undang - Undang nomor : 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Saat ini program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga masih menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah RI, sehingga program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden RI tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka dikeluarkanlah Undang - Undang nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pada pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pada lampiran Undang - Undang nomor : 23 tahun 2014 dalam urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dicantumkan pada sub urusan keempat tentang standarisasi pelayanan KB yang harus disiapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang - Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintah yaitu: (1)

sub urusan Pengendalian Penduduk, (2) sub urusan Keluarga Berencana, (3) sub urusan Keluarga Sejahtera, dan (4) sub urusan Sertifikasi dan Standarisasi.

Penyusunan perangkat Pelatihan Fungsional Dasar (LFD) Penyuluh Keluarga Berencana yang berkualitas di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka mendukung program Banggakencana, maka diperlukan suatu pelatihan yang secara sistematis dirancang untuk mencapai tujuan penyusunan tersebut. Selanjutnya, Pelatihan yang dilaksanakan di BKKBN peruntukkannya oleh tenaga Fasilitator yang akan membentuk Penyuluh KB di lapangan menjadi lebih profesional.

Saya sangat menyambut baik diterbitkannya perangkat pelatihan ; Modul dan media/Bahan Tayang Pelatihan Fungsional Dasar sebagai upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung program Banggakencana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan perkembangan terkini.

Akhirnya kepada semua pihak diucapkan terima kasih atas partisipasi, kontribusi, masukan, saran dan koreksi, hingga tersusunnya Perangkat pelatihan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita dalam mendukung dan mengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara profesional, hingga terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Berencana itu Keren.

Jakarta, 30 Maret 2022

Deputi Bidang Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan,



Prof. drh. Muhammad Rizal Damanik, MrepSc., PhD.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Paket Perangkat Pelatihan Fungsional Dasar dengan tepat dan berkualitas guna kepentingan menjaga mutu penyelenggaraan dan memenuhi standarisasi program pelatihan yang disyaratkan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah secara berkesinambungan mengembangkan Perangkat Pelatihan Fungsional Dasar yang dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi bagi Penyuluh Keluarga Berencana/PLKB. Dengan demikian, para fasilitator, pengelola dan pelaksana dapat melakukan Pengelolaan program Bangga Kencana sesuai dengan standar dari pelaksanaan sampai dengan di tingkat Lini Lapangan.

Pelatihan Fungsional Dasar ini khususnya untuk memantapkan keterampilan peserta dalam pelaksanaan Pengelolaan yang terkini dalam rangka mendukung program Banggakencana.

Perangkat pelatihan ini adalah acuan untuk menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Dasar. Tujuan pedoman pelatihan teknis ini adalah menciptakan panduan yang layak mengenai tahapan pelaksanaan dan evaluasi yang harus dikerjakan oleh penyelenggara pelatihan yang dimasud untuk mewujudkan *good governance*.

Untuk tercapainya tujuan pelatihan sebagaimana yang diharapkan, maka kurikulum dan bahan pembelajaran Pelatihan Fungsional Dasar dilengkapi dengan berbagai media antara lain *handout slide*, dan video yang secara terus menerus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Media pembelajaran tersebut diharapkan dapat menguatkan proses belajar

mengajar dan meningkatkan kompetensi kepada peserta Pelatihan Fungsional Dasar bagi Penyuluh KB.

Penyempurnaan dan pengembangan perangkat pelatihan kekinian tentunya akan terus dilakukan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan wilayah, masyarakat, serta perkembangan program, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerbitan Paket Perangkat) Pelatihan Fungsional Dasar ditujukan untuk lebih memantapkan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program Bangsa kencana.

Semoga dengan diterbitkannya paket pembelajaran Pelatihan Fungsional Dasar bagi Penyuluh KB di Kabupaten dan Kota, dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengelolaan program Banggakencana.

Akhir kata, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Paket Perangkat Pelatihan ini. Semoga paket pelatihan ini bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Dasar yang berkualitas.

Jakarta, 25 Maret 2022

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kependudukan dan Keluarga Berencana,



Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Manfaat Modul Bagi Peserta	3
D. Tujuan Pembelajaran	4
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
F. Petunjuk Belajar.....	5
BAB II KONSEP PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA	6
A. Kondisi Umum Keluarga Indonesia.....	6
B. Isu Strategis.....	7
C. Kebijakan dan Strategi	12
D. Rangkuman.....	13
E. Latihan.....	14
F. Evaluasi Formatif.....	14
G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut.....	17
BAB III PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA BALITA DAN ANAK	19
A. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).....	19
B. BKB Holistik Integratif.....	20
C. Program dan Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).....	21
D. Pengelolaan Program dan Kegiatan BKB Holistik Integratif (HI)	23
E. Media BKB Kit.....	26
F. Rangkuman.....	31
G. Latihan.....	32
H. Evaluasi Formatif.....	33

I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	35
BAB IV PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA REMAJA.....	36
A. Gambaran “Remaja” Dan Problematikanya	36
B. Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja.....	44
C. Rangkuman	53
D. Latihan	54
E. Evaluasi Formatif	55
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	57
BAB V PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA LANSIA RENTAN	58
A. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL).....	58
B. Media Partisipatif (BKL Kit) 7 Dimensi Lansia Tangguh	60
C. Pendampingan Lansia	60
D. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	62
E. Rangkuman	65
F. Latihan	66
G. Evaluasi Formatif	66
H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	68
BAB VI PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KELUARGA.....	69
A. Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).....	69
B. Strategi Pemberdayaan Usaha	71
C. Rangkuman	74
D. Latihan	75
E. Evaluasi Formatif	76
BAB VII PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Tes Sumatif.....	80
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kependudukan memiliki 2 (dua) dimensi utama yaitu kuantitas dan kualitas penduduk. Salah satu upaya pembangunan kependudukan dilakukan dengan cara mengatur dan mengendalikan jumlah penduduk pada sisi kuantitas. Sedangkan, sisi kualitas penduduk saat ini masih menjadi konsep yang relatif abstrak yang hendaknya diturunkan ke dalam indikator-indikator yang terukur (*tangibel*). Permasalahan kependudukan dapat ditinjau dari segi kuantitas, kualitas dan juga mobilitas penduduk sebagai dinamika interaksi kuantitas dan kualitas penduduk. Salah satu cara pemecahan permasalahan kependudukan adalah dengan melakukan intervensi awal kepada keluarga, sebagai sistem social terkecil yang ada di dalam masyarakat. BKKBN sebagai institusi pemerintah yang fokus pada kebijakan dan program Pembangunan Keluarga, memosisikan keluarga sebagai "*beyond family planning*". Posisi keluarga disini menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan beberapa dimensi keluarga melalui Program BKKBN yang tentunya saling bersinergi.

Keluarga adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat ikatan, nilai-nilai yang dianut, dan tujuan yang ingin dicapai. Di dalam keluarga terdapat pengaturan-pengaturan yang akan menentukan seluruh pengambilan keputusan di dalam keluarga, yang tentunya akan selalu melibatkan para anggota keluarga secara subjektif. Keluarga merupakan sistem sosial terkecil yang dibangun oleh dua orang individu/penduduk, untuk kemudian menjalankan fungsi, antara lain fungsi reproduksi yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sistem sosial. Dengan demikian, kehidupan keluarga merupakan unit sosial terkecil yang akan menentukan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

- A. Pembangunan kependudukan terkait dengan pembangunan keluarga, termaktub dalam Undang-Undang mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU No. 10 tahun 1992 yang diamandemen menjadi UU No. 52 tahun 2009). Menurut UU No 52 tahun 2009 keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga juga dijabarkan dalam PERKA BKKBN No 72 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang menekankan pada pembinaan keluarga balita dan anak, ketahanan remaja, pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
- B. ASN BKKBN, dalam hal ini jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Ahli Pertama menjadi tenaga lini lapangan yang langsung berinteraksi dengan keluarga-keluarga di Indonesia untuk melakukan penyuluhan dalam kaitannya dengan program pengendalian penduduk. Sebagai pengelola dan pelaksana program di lini lapangan, PKB/PLKB dilengkapi dengan berbagai kemampuan, baik kemampuan *leadership*, manajerial maupun kemampuan teknis operasional, serta harus memiliki kompetensi dalam rangka menjawab persoalan masalah kependudukan pada masa yang akan datang. Kompetensi PKB yang perlu dikembangkan sebagaimana tertuang dalam manajemen ASN (UU No.5 Tahun 2014 pasal 69 point a, b dan c tentang Aparatur Sipil Negara), terdiri atas: 1) Kompetensi Teknis, 2) Kompetensi Manajerial, dan 3) Kompetensi Sosial Kultural.

Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Dan tujuan umum kompetensi teknis PKB adalah mewujudkan penyuluhan dan pelayanan

kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang profesional dan berkualitas dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unit kompetensi teknis PKB antara lain: 1) Menginisiasi dan Memfasilitasi Pembentukan Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKA; 2) Melaksanakan pembinaan kelompok bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M dan UPPKA; 3) Melakukan fasilitasi dan koordinasi kemitraan pembangunan keluarga.

Modul Pembangunan Keluarga ini dibuat dalam rangka memperkuat kompetensi Penyuluh KB ahli pertama agar dapat membentuk kompetensi teknis dalam melakukan fasilitasi program Bangga Kencana di lapangan.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membahas konsep pembinaan keluarga, program dan kegiatan keluarga balita dan anak, program dan kegiatan keluarga remaja dan PIK remaja, program keluarga lansia dan rentan serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

C. Manfaat Modul Bagi Peserta

Manfaat modul ini adalah dapat dijadikan bahan acuan dalam memahami program dan kegiatan Pembangunan Keluarga yang dikembangkan BKKBN berdasarkan UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dengan demikian, diharapkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang menggunakan modul ini dapat lebih fokus lagi dalam mengemban tugas untuk menjalankan program Pembangunan Keluarga di lapangan.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan Pembangunan Keluarga, peserta diharapkan akan dapat mengimplementasikan program dan kegiatan Pembangunan Keluarga di BKKBN dengan baik dan benar.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, peserta diharapkan akan dapat:

- a. Menjelaskan konsep program pembangunan keluarga
- b. Menjelaskan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak
- c. Menjelaskan kegiatan pembinaan ketahanan remaja
- d. Menjelaskan kegiatan ketahanan lansia dan rentan
- e. Menjelaskan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan keluarga

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Konsep Program Pembangunan Keluarga
 - a. Kondisi umum pembangunan keluarga di Indonesia
 - b. Isu Strategis
 - c. Kebijakan dan Strategi Kedepujian Bidang KSPK
2. Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak
 - a. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
 - b. BKB Holistik Integratif
 - c. Program dan Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
 - d. Media BKB Kit
3. Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja
 - a. Gambaran “Remaja” dan Problematikanya
 - b. Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja

4. Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia Rentan
 - a. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)
 - b. Media Partisipatif (BKL Kit) 7 Dimensi Lansia Tangguh
 - c. Pendampingan Lansia
 - d. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
5. Pemberdayaan Ekonomi dan Keluarga
 - a. Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA)
 - b. Strategi Pemberdayaan Usaha

F. Petunjuk Belajar

1. Bacalah dengan seksama indikator keberhasilan setiap bab, indikator keberhasilan merupakan tolak ukur keberhasilan Anda dalam belajar.
2. Bacalah materi yang diberikan oleh widyaiswara ini secara berurutan dengan seksama, tanyakan apabila ada yang kurang dimengerti.
3. Diskusikan dengan teman-teman Anda tentang materi-materi yang perlu pemahaman lebih lanjut.
4. Kerjakan soal-soal latihan yang diberikan untuk mengukur kemampuan Anda.
5. Untuk memperkaya pengetahuan carilah informasi dari sumber-sumber lain yang relevan.

Baiklah, **Selamat Belajar!** Semoga Anda sukses menerapkan materi yang diuraikan dalam mata pelatihan Program dan Kegiatan Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga ini, serta dapat melaksanakan tugas sehari-hari Anda sebagai seorang PKB secara lebih baik.

BAB II

KONSEP PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA

*Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan
konsep program pembangunan keluarga*

A. Kondisi Umum Keluarga Indonesia

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA). Sebagai semangat untuk lebih mendekatkan dan memberikan manfaat program kepada keluarga-keluarga Indonesia, pembangunan keluarga ditempatkan di awal nomenklatur program menjadi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Berdasarkan Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020–2024, melalui Program Pembangunan Keluarga, Deputi Bidang KSPK dituntut untuk berkontribusi terhadap (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020 – 2024, yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, Deputi Bidang KSPK berperan dalam Program Prioritas (PP) “Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan” pada Kegiatan Prioritas (KP) (1) “Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi”, dan (2) “Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat”.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembangunan keluarga Indonesia diantaranya: a) Belum optimalnya pengetahuan orangtua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; b) Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (generasi milenial dan generasi

zilenial); c) Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga; d) Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga; e) Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia; f) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga; dan masih terjadi disintegrasi bidang pembangunan keluarga lintas sektor. g) Belum seluruh keluarga akseptor KB Lestari MKJP dan akseptor KB Mandiri MKJP memiliki kemandirian secara ekonomi.

B. Isu Strategis

Isu strategis di Indonesia saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra Deputy Bidang KSPK 2020 – 2024 di antaranya adalah:

1. Bonus demografi

Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020- 2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdayasaing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk menyiapkan SDM berkualitas dengan karakteristik tersebut dimulai dari penyiapan kualitas anak dan remaja dengan penguatan peran pengasuhan orangtua di keluarga. Masih terdapatnya balita *stunting* dan remaja putri putus sekolah karena perilaku berisiko yang menyebabkan mengalami kehamilan tidak diinginkan sehingga menutup kesempatannya untuk berkiprah optimal dalam pembangunan pada masa bonus demografi.

2. Ageing Population

Perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu dampak pengendalian *TFR* dan perbaikan status kesehatan. Jumlah dan proporsi lansia di Indonesia akan mengalami peningkatan yang

lebih cepat dibanding dengan negara-negara yang telah mengalami ageing sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (ageing population) ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat.

3. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga

Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini, bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan).

4. Angka Kematian Ibu dan Bayi masih tinggi

Kondisi kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal yang menggembirakan, dimana Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017). Situasi ini harus mendapat perhatian khusus serta membutuhkan kerja keras bersama (lintas sektor dan pelibatan pihak swasta dan masyarakat) untuk terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia

sebagaimana target yang ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Deputi Bidang KSPK berkontribusi dalam Kegiatan Prioritas Nasional (KP) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi tentu perlu merumuskan strategi program/kegiatan yang spesifik dalam penanganan AKI dan AKB ini. Salah satu penyebab tingginya AKI adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat berisiko pada kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya.

5. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses 8 reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Pilihan untuk menikah di usia muda karena terlebih dahulu mengalami kehamilan tidak diinginkan mengakibatkan keluarga yang dibangun tidak dilandaskan kesiapan sehingga punya potensi untuk mengalami perceraian. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga;

6. Prevalensi *stunting* masih tinggi

Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Di Indonesia, angka Prevalensi *stunting* cenderung tinggi pada yakni 37,2 % pada tahun 2013. Namun selanjutnya angka tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut yakni 30,8% (2018), 27,7 % (2019) dan pada tahun 2021 menjadi 24,4 % (Data SSGI, 2021). Meskipun demikian, pemerintah tetap harus memberikan perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Terutama sejak diamanatkannya BKKBN menjadi koordinator percepatan penurunan *stunting* oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini di dukung dengan di terbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres tersebut merupakan payung hukum dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018.

7. Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga

Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga baru mencapai 38 % (SKAP 2018). Adapun 8 fungsi keluarga tersebut adalah: (1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan (Peraturan Pemerintah No: 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga).

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan dan pengembangan karakter manusia Indonesia yang positif. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun social budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang berkarakter. Lebih lanjut, untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing dalam kompetisi dengan negara-negara lain maka peran kebudayaan dan karakter bangsa menjadi sangat penting. Cita-cita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berbudaya dan berkarakter dapat dilakukan melalui pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga. Keluarga bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terkait nilai toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian terhadap sesama, serta cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini dapat didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang mensosialisasikan serta membudayakan 8 fungsi keluarga sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral dan karakter yang bermartabat; dan harmonis.

8. Pernikahan usia anak

Kasus pernikahan usia anak banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dan telah menjadi perhatian internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran, infeksi penyakit menular seksual, serta risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia yang relatif sangat muda. Meskipun angka pernikahan anak mengalami penurunan secara bertahap dari 33 % pada 1985, 26 % pada 2010, dan 23 % pada 2016, namun prevalensinya masih relative konstan.

Dalam laporan “Perkawinan Usia Anak di Indonesia” yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan *United Nations Children’s Fund (UNICEF)* pada Januari 2017 terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibanding angka nasional (22,8 persen). Prevalensi atau angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di perdesaan dengan angka 27,1 persen, dibandingkan dengan di perkotaan (17,1persen). Permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada generasi yang selanjutnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Keadaan ekonomi rendah akan mengakibatkan sulitnya akses terhadap fasilitas penunjang keterampilan dan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, pangan dan gizi serta akses terhadap lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Langkah penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya praktik penundaan usia menikah melalui keluarga (orang tua), kelompok kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi melalui sekolah/ guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat.

C. Kebijakan dan Strategi

Deputi Bidang KSPK menyusun arah kebijakan dan strategi Program Pembangunan Keluarga dengan mengoptimalkan potensi-potensi dan memahami permasalahan keluarga-keluarga di Indonesia. Program dan kegiatan dikembangkan dengan memperkecil ketimpangan antara potensi dan permasalahan. Potensi yang dapat dioptimalkan dalam pembangunan keluarga adalah yang terkait dengan peran dan fungsi keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan dimanapun ia berada, baik dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter

dan kepribadian remaja terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Pendidikan anak usia dini harus dilakukan secara holistik (menyeluruh). Pengembangan dan pendidikan anak sejak usia dini merupakan investasi yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan karakter anak.

Demikian pula dalam pembinaan remaja, keluarga merupakan wahana yang tepat dalam melakukan pendampingan terhadap remajanya untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian dalam kaitan dengan lanjut usia, sebagian besar lansia di Indonesia masih tinggal bersama keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus dipersiapkan agar memahami konsep 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan mampu melakukan pendampingan perawatan jangka panjang (*long-term care*) lansia. Tujuh dimensi lansia tangguh tersebut adalah; (1) Spiritual; (2) Intelektual; (3) Fisik; (4) Emosional; (5) Sosial- Kemasyarakatan; (6) Profesional Vokasional; dan (7) Lingkungan. Sementara itu, lansia yang potensial tetap didorong untuk menjadi lansia yang aktif (*activeageing*) yang dapat bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya.

D. Rangkuman

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020–2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020–2024. Adapun arah kebijakan dan strategi Kedeputan KSPK adalah sebagai berikut: 1) Penguatan pemahaman 8 Fungsi Keluarga; 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga; 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan Kehidupan Keluarga bagi remaja; 4) Peningkatan Kemandirian ekonomi keluarga; 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan; 6) Penguatan Pelayanan

Ramah Lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

E. Latihan

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Sebutkan kontribusi Deputi Bidang KSPK berdasarkan Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020–2024, melalui Program Pembangunan Keluarga dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020 – 2024.
2. Uraikan beberapa Isu strategis di Indonesia saat ini yang perlu mendapat perhatian dalam perumusan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra Deputi Bidang KSPK 2020 – 2024.
3. Jelaskan arah kebijakan dan strategi Program Pembangunan Keluarga dalam mengoptimalkan potensi–potensi dan memahami permasalahan keluarga-keluarga di Indonesia saat ini.
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *stunting*!
5. Mengapa keluarga menjadi titik tolak utama dalam kebijakan dan strategi ke deputian KSPK?

F. Evaluasi Formatif

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih A, B, C, D atau E pada jawaban yang menurut Saudara paling tepat!

1. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembangunan keluarga Indonesia diantaranya ...
 - a. Belum optimalnya pengetahuan remaja tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
 - b. Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (generasi milenial dan generasi zilenial)

- c. Kurangnya pemahaman lansia tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga
- d. Perubahan struktur ekonomi dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga
- e. Masih lemahnya kebersihan diri dan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia

2. . Di Indonesia, angka Prevalensi *stunting* cenderung tinggi pada yakni...

- a. 35,2 % pada tahun 2013. Namun selanjutnya angka tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut yakni 30,8% (2018), 26,7 % (2019) dan pada tahun 2021 menjadi 23,4 % (Data SSGI, 2021).
- b. 38,2 % pada tahun 2013. Namun selanjutnya angka tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut yakni 38,8% (2018), 27,7 % (2019) dan pada tahun 2021 menjadi 22,4 % (Data SSGI, 2021).
- c. 36,2 % pada tahun 2013. Namun selanjutnya angka tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut yakni 20,8% (2018), 27,7 % (2019) dan pada tahun 2021 menjadi 23,4 % (Data SSGI, 2021).
- d. 37,2 % pada tahun 2013. Namun selanjutnya angka tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut yakni 30,8% (2018), 27,7 % (2019) dan pada tahun 2021 menjadi 24,4 % (Data SSGI, 2021).
- e. 38,2 % pada tahun 2013. Namun selanjutnya angka tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut yakni 39,8% (2018), 27,7 % (2019) dan pada tahun 2021 menjadi 44,4 % (Data SSGI, 2021).

3. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada ...

- a. generasi yang selanjutnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan
- b. generasi keluarga millennial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan asupan gizi
- c. generasi lansia yang tidak tangguh dalam memenuhi harapan hidupnya yang panjang

- d. generasi berencana yang tidak mampu bersaing dalam dunia global
 - e. generasi baduta dan balita yang tidak dapat tumbuh kembang secara optimal
4. Delapan fungsi keluarga berdasarkan Peraturan Pemerintah No: 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga adalah ...
- a. (1) Fungsi Religi; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Kesehatan Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Peningkatan Ekonomi Keluarga, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan
 - b. 1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan
 - c. 1) Fungsi Beragama; (2) Fungsi Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Proteksi; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Lingkungan
 - d. 1) Fungsi Religi; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Proteksi; (5) Fungsi Kesehatan Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan
 - e. 1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan
 - f. 1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Sayang; (4) Fungsi Perawatan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Masyarakat; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pemeliharaan Lingkungan
5. Kondisi kesehatan ibu dan anak berdasarkan data SUPAS 2015 dan SDKI 2017 menunjukkan ...

- a. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 300 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 25 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017)
- b. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 405 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017).
- c. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017)
- d. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 505 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 44 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017)
- e. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 1.000.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2017)

G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut

- **Umpan balik**

Cocokkan hasil jawaban Evaluasi Saudara dengan rambu jawaban yang ada pada bagian akhir dari modul ini dan hitunglah jawaban yang benar. Kemudian gunakan formula seperti di bawah ini, untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara:

- **Tindak Lanjut**

Jika tingkat kategori penguasaan sudah baik, maka lanjutkanlah latihan dengan menerapkan pola diskusi dengan teman Saudara. Tetapi bila penguasaan Saudara

$$\frac{\text{Jumlah Soal yang dijawab Benar}}{\text{Jumlah Keseluruhan Soal}} \times 100\% = \text{Nilai Perolehan Peserta}$$

Skor Nilai Perolehan:

90%–100% = baik sekali

80%–89% = baik

70%–79% = cukup

60%–69% = kurang

>59% = kurang sekali

masih dalam tingkat kategori cukup, maka cobalah mempelajari ulang seluruh materi Bab ini hingga penguasaan Saudara pada test formatif berada pada kategori Baik.

BAB III

PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA BALITA DAN ANAK

*Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan
pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak*

A. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Pasal 47 ayat (1), menetapkan kebijakan bagi pemerintah dan pemerintah daerah mengenai pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a berkaitan dengan pembangunan keluarga yang dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan cara peningkatan kualitas anak, pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak.

Peningkatan kualitas anak dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dilakukan melalui Bina Keluarga Balita dan Anak yang telah dirintis sejak tahun 1984 yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Program Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan membina kesertaan ber-KB bagi keluarga balita dalam mendukung terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera.

Seiring dengan perubahan kebijakan kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, program Bina Keluarga Balita lebih luas cakupannya dengan sasaran selain keluarga yang punya anak balita, juga mencakup keluarga yang

mempunyai anak usia 6–10 tahun. Untuk memberikan arah dalam pengelolaan program ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak di setiap tingkatan wilayah, maka perlu disusun Panduan Operasional BKB dan Anak.

Terselenggaranya Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) juga merupakan upaya BKKBN menjangkau segmentasi sasaran, dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok BKB. Pembentukan Kelompok BKB dilakukan sebagai wadah pembinaan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Pengembangan kelompok BKB dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok melalui kerjasama dengan mitra terkait baik sektor pemerintah maupun swasta. Salah satu bentuk pengembangannya adalah keterpaduan BKB–Posyandu–PAUD (pendidikan) dan pembentukan kelompok BKB Holistik Integratif di setiap kecamatan.

B. BKB Holistik Integratif

Dalam rangka peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak, orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak serta menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini dilakukan melalui upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pengasuhan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BKB Holistik Integratif adalah layanan penyuluhan bagi orangtua tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan dengan program pengembangan anak usia dini lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak.

Tujuan BKB Holistik Integratif adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola dan pelaksana tentang Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB) yang holistik integratif, serta memantapkan dan menguatkan kelompok kegiatan BKB.

C. Program dan Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)

Pengembangan kebijakan dan strategi operasional dilakukan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Adapun kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam pengembangan kebijakan dan strategi operasional program ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak, meliputi: 1) Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengelolaan Program Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak; 2) Penyusunan dan pengembangan peta kerja. Peta kerja berisikan tentang informasi-informasi yang diperlukan dalam rangka penajaman segmentasi sasaran yang meliputi : jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0-10 tahun, jumlah anak per kelompok usia, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), jumlah kader BKB dll.

Pembentukan dan pengembangan Kelompok BKB yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut: 1) Pembentukan Kelompok BKB dilakukan sebagai wadah pembinaan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; 2) Pengembangan Kelompok BKB dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok melalui kerjasama dengan mitra terkait baik sektor pemerintah maupun swasta. Salah satu bentuk pengembangannya adalah keterpaduan BKB-Posyandu-PAUD (pendidikan) dan pembentukan kelompok BKB Holistik Integratif di setiap kecamatan.

Pada setiap kelompok BKB juga dilakukan pengembangan dan penyediaan sarana BKB Kit dalam rangka meningkatkan upaya pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang anak. Sarana BKB Kit digunakan sebagai alat bantu penyuluhan berisi materi dan media penyuluhan sebagai sarana dalam menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak.

Peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi pengelola dan pelatih dalam pembinaan BKB dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan dan orientasi untuk pelatih

(*Training of Trainer*), pelatihan teknis dan orientasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Pusat sampai dengan Kabupaten dan Kota. Kegiatan Sosialisasi seluruh Program Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak dilakukan melalui berbagai upaya yaitu melalui seminar, pemanfaatan momentum (Rakernas, Hari Keluarga, Hari Anak, Peringatan Hari Ibu dan lain lain), tatap muka pada forum-forum pertemuan, serta Bimbingan Teknis secara langsung kepada para pelaksana dan pengelola program pada setiap jenjang wilayah dari Tingkat Pusat, Provinsi, sampai Kabupaten dan Kota.

Kerjasama dengan lintas sektor dan mitra kerja juga dilakukan untuk mengembangkan Program Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak dengan baik, bekerja sama dengan lintas sektor dan mitra-mitra kerja terkait yang menangani keluarga dan anak. Kerjasama dengan lintas sektor dan mitra kerja ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dalam menyusun kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Disamping itu, diharapkan mitra kerja dapat melibatkan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSOM), tokoh agama (TOGA), tokoh masyarakat (TOMA), masyarakat dan keluarga dalam upaya mengembangkan Program ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak.

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan terhadap pelaksanaan operasional dan keberlangsungan Program Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak. Program evaluasi dilakukan terhadap hasil-hasil pencapaian dan hambatan-hambatan yang muncul didalam pelaksanaannya. Sedangkan, Program Monitoring dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap kelompok BKB dapat dilakukan langsung oleh Petugas Lapangan KB (PKB) kepada setiap kelompok BKB di setiap pertemuan. Program Evaluasi dan Monitoring ini bertujuan secara keseluruhan melihat sejauh mana pengembangan kelompok BKB dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota hingga kecamatan/desa/kelurahan.

Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan dalam Program Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksanaan kegiatan oleh kelompok BKB di tingkat lini lapangan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan pusat.

D. Pengelolaan Program dan Kegiatan BKB Holistik Integratif (HI)

Pelaksanaan teknis BKB Holistik Integratif dilakukan melalui pembentukan kelompok BKB dan BKB Holistik Integratif dengan kegiatan sebagai berikut: Pembentukan kelompok BKB berdasarkan identifikasi potensi kelompok-kelompok sasaran sesuai kriteria kelompok BKB, Pembentukan kelompok BKB Holistik Integratif dilakukan dari BKB yang sudah ada, dan Penentuan BKB Holistik Integratif dilakukan melalui identifikasi kriteria kelompok.

Model pengembangan BKB Holistik Integratif meliputi model pengembangan BKB Holistik Integratif didasarkan pada upaya pengembangan anak usia dini untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi, untuk dapat memudahkan pemberian pelayanan dasar terhadap anak usia dini sekaligus memperkuat kegiatan BKB agar semakin eksis.

Penyuluhan meliputi kegiatan sebagai berikut: Penyuluhan dilakukan secara terstruktur dan dilakukan pertemuan minimal 1 (satu) bulan sekali. Adapun mekanisme pelaksanaan pertemuan penyuluhan adalah waktu, tempat, dan jadwal materi penyuluhan. Penyampaian materi dan tatalaksana pertemuan penyuluhan.

Kegiatan Pemantauan Tumbuh Kembang meliputi pemantauan tumbuh kembang anak dilakukan dengan Kartu Kembang Anak. Kartu Kembang Anak yang digunakan sebagai alat untuk memantau perkembangan anak. Apabila orang tua balita tidak hadir dua kali berturut-turut dalam pertemuan BKB, maka kader harus melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah bertujuan untuk memantau pertumbuhan anak melalui kartu kembang anak.

Berdasarkan Kartu Kembang Anak maka dapat dipantau anak balita yang tidak dapat melaksanakan tugas perkembangan tertentu selama tiga bulan berturut-turut sesuai dengan tingkat perkembangan yang harus dicapai pada kartu kembang anak, maka dapat diberikan rujukan. Kegiatan Rujukan dilakukan oleh kader dengan mengisi formulir rujukan. Adapun tempat rujukan meliputi: Puskesmas, Praktek Bidan, Praktek Dokter, dan Psikolog. Rujukan juga dilakukan menggunakan Pengantar Surat Rujukan

dari kader BKB/Posyandu meliputi: Surat keterangan dari Puskesmas sebagai tindak lanjut rujukan yang dilakukan oleh kader BKB/Posyandu.

Kelompok BKB terdiri dari enam kelompok umur meliputi: 0–1 tahun; 1–2 tahun; 2–3 tahun; 3–4 tahun; 4–5 tahun; dan 5–6 tahun. Adapun setiap kelompok umur terdiri dari tiga orang kader BKB. Kader BKB terdiri dari: 1) kader inti bertugas sebagai penyuluh yang menyampaikan materi kepada orang tua dan bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan; 2) kader piket bertugas mengasuh anak balita yang ikut orangtuanya ke tempat penyuluhan; dan 3) kader bantu bertugas membantu tugas kader inti dan kader piket, serta menggantikan tugas kader inti dan kader piket apabila berhalangan hadir. Tugas kader BKB meliputi: 1) memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan; 2) mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya; 3) memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah; 4) memotivasi orangtua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang; 5) membuat laporan kegiatan.

Syarat yang ditentukan untuk menjadi kader BKB meliputi: 1) laki-laki atau perempuan yang tinggal di lokasi kegiatan, mempunyai minat terhadap pengasuhan dan tumbuh kembang anak; 2) mampu baca-tulis dan menguasai bahasa Indonesia serta bahasa daerah setempat; 3) bersedia dilatih sebelum melaksanakan tugas; dan 4) mampu berkomunikasi dengan orangtua balita secara baik.

Sarana yang tersedia di kelompok BKB meliputi: 1) Materi penyuluhan terdiri dari lembar balik, bebreran/poster lipat dan kantong wasiat; 2) Media BKB terdiri dari alat permainan edukatif (APE), dongeng dan cerita serta musik dan lagu. Sedangkan, prasarana penyuluhan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya kegiatan penyuluhan, dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan BKB. Prasarana penyuluhan meliputi, tempat penyimpanan materi dan media penyuluhan, Papan nama kelompok, Kartu Kembang Anak (KKA), Buku administrasi kelompok; dan Alat tulis. Pencatatan dan Pelaporan pada Kelompok BKB, meliputi: 1) Kartu data potensi kelompok kegiatan BKB (K/O/BKB/15); 2) Register keluarga yang mempunyai balita (R/I/BKB/15).

Tahapan kegiatan adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dan disampaikan kader secara berurutan agar dapat mencapai tujuan pertemuan. Tahapan kegiatan terdiri dari : 1) Pembukaan dan Tinjauan Kembali; 2) Berisi doa pembuka, informasi tentang KB, tinjauan tentang materi/informasi pada pertemuan sebelumnya dan tinjauan terhadap tugas rumah; 3) Pengenalan Topik; 4) Berisi informasi tentang judul dan tujuan pertemuan serta informasi atau kegiatan pengantar yang berkaitan dengan topik pertemuan; 5) Kegiatan Inti; 6) Berisi diskusi kelompok, permainan, kalimat-kalimat informasi serta penggunaan media, bahan dan alat pendukung seperti lembar balik, film cerita, poster dan Buku KIA; 7) Kesimpulan; 8) Berisi proses penarikan kesimpulan oleh seluruh peserta; 9) Pengisian Kartu Kembang Anak; 10) Merupakan kegiatan pengisian Kartu Kembang Anak oleh kader dan orang tua (peserta/anggota BKB) untuk memantau perkembangan anak ; 11) Penyampaian Tugas Rumah; 12) Berisi perilaku pengasuhan yang diharapkan untuk dilakukan di rumah oleh peserta/anggota BKB; 13) Penutup; 14) Berisi doa penutup informasi tentang KB dan salam penutup.

BKKBN memiliki peranan dalam pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dengan cara Promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (sejak saat kehamilan hingga anak berusia 2 tahun). Target kegiatan tersebut adalah Ibu hamil dan keluarga baduta yang terpapar 1000 HPK. Kegiatan prioritas telah dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak Tahun 2020 – 2024. Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dilaksanakan melalui kegiatan: 1) Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola dan Pelaksana Program BKB; 2) Sosialisasi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan bagi Ibu Hamil dan Keluarga yang memiliki anak usia sampai 2 (dua) tahun; 3) Monitoring dan evaluasi kepada kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas pencegahan *stunting*


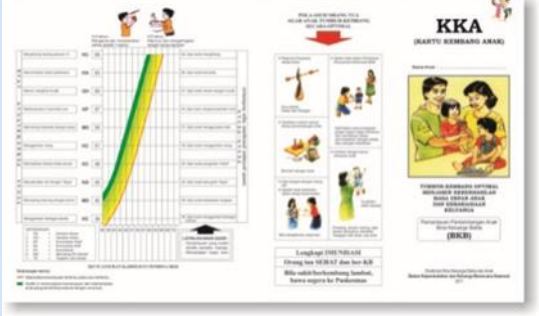

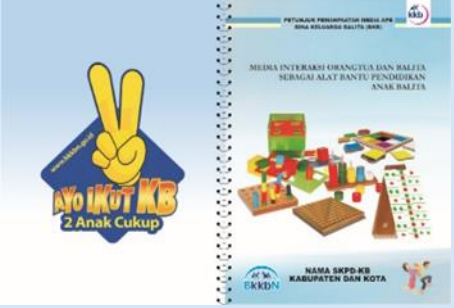

Materi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan terdapat pada Modul BKB Emas yang terdiri dari: 1) Penerapan 8 Fungsi Keluarga dalam masa 1000 HPK; 2) Kesehatan fisik dan mental Ibu Hamil dan Ibu Menyusui; 3) Pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi Ibu Hamil dan Keluarga Baduta; 4) Stimulasi perkembangan anak







pada masa 1000 HPK; 5) Meningkatkan peran ayah dan anggota keluarga lainnya; 6) Pengasuhan yang tanggap (cepat dan tepat) terhadap kebutuhan anak.

E. Media BKB Kit

Berikut beberapa media BKB Kit yang dapat digunakan dalam pertemuan kelompok BKB sebagai berikut:

NO.	NAMA MEDIA	DESKRIPSI
1.	Buku Menjadi Orang Tua Hebat dalam Mengasuh Anak	
2.	Buku Pegangan Kader BKB dan Orangtua Tentang Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga	
3.	Buku Peran Ayah Dalam Pengasuhan	

4.	Buku Pengasuhan Anak Umur 0-6 Tahun bagi Orangtua yang Bekerja	
5.	Kartu Kembang Anak (KKA)	
6.	Buku Pedoman Kartu Kembang Anak (KKA)	
7.	Buku Panduan Alat Permainan Edukatif (APE)	
8.	Flashdisk Video Kelengkapan BKB	

<p>9.</p>	<p>Media Penyuluhan BKB</p>	
<p>10.</p>	<p>Modul BKB HI</p>	
<p>11.</p>	<p>USB Film Video BKB HI</p>	
<p>12.</p>	<p>Tas BKB Kit</p>	
<p>13.</p>	<p>Tas APE</p>	
<p>14.</p>	<p>Kotak Packaging (Hardcase)</p>	

15.	Kardus BKB Kit	
16.	Papan Nama Kelompok BKB	

Adapun Media BKB Kit *Stunting* sebagai berikut:

NO	NAMA MEDIA	DESKRIPSI
1.	E-Book Modul Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan	
2.	E-Kalender Pengasuhan 1000 HPK	
3.	Board Game "Pengasuhan 1000 HPK"	

4.	Mainan Gantung Bayi	
5.	Buku Kain Stimulasi	
6.	Halo Ayah Ibu	
7.	Pergi ke Kebun Binatang	
8.	Mari Pakai Baju	
9.	Isi Piringku	

10.	Pengenalan Buah			
11.	Mari Bersih Diri			
12.	Pengenalan Angka			
13.	Memberi Makan Binatang			
14.	6 in 1 Pusat Aktivitas Anak			

F. Rangkuman

Terselenggaranya Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) juga merupakan upaya BKKBN menjangkau segmentasi sasaran, dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok BKB. Pembentukan Kelompok BKB

dilakukan sebagai wadah pembinaan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Pengembangan kelompok BKB dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok melalui kerjasama dengan mitra terkait baik sektor pemerintah maupun swasta. Salah satu bentuk pengembangannya adalah keterpaduan BKB-Posyandu-PAUD (pendidikan) dan pembentukan kelompok BKB Holistik Integratif di setiap kecamatan.

Model pengembangan BKB Holistik Integratif meliputi model pengembangan BKB Holistik Integratif didasarkan pada upaya pengembangan anak usia dini untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi, untuk dapat memudahkan pemberian pelayanan dasar terhadap anak usia dini sekaligus memperkuat kegiatan BKB agar semakin eksis.

BKKBN memiliki peranan dalam pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dengan cara Promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (sejak saat kehamilan hingga anak berusia 2 tahun). Target kegiatan tersebut adalah Ibu hamil dan keluarga baduta yang terpapar 1000 HPK. Kegiatan prioritas telah dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak Tahun 2020 – 2024. Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dilaksanakan melalui kegiatan: 1) Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola dan Pelaksana Program BKB; 2) Sosialisasi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan bagi Ibu Hamil dan Keluarga yang memiliki anak usia sampai 2 (dua) tahun; 3) Monitoring dan evaluasi kepada kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas pencegahan *stunting*.

G. Latihan

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Jelaskan Program dan Kegiatan Ketahanan Bina Keluarga Balita BKKBN!
2. Jelaskan peran penting program BKB pada Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan!

3. Jelaskan pentingnya pengasuhan 1000 HPK!
4. Deskripsikan media BKB KIT *Stunting* dan jelaskan fungsinya!
5. Mengapa perlu dilakukan kerjasama dengan lintas sektor dan mitra kerja untuk mengembangkan Program Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak?

H. Evaluasi Formatif

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih A, B, C, D atau E pada jawaban yang menurut Saudara paling tepat!

1. Salah satu tugas kader BKB adalah ...
 - a. memberikan nasihat sesuai dengan materi yang telah ditentukan
 - b. mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya
 - c. mengadakan kunjungan desa setempat
 - d. memotivasi pengasuh untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang
 - e. membuat kegiatan besar dalam rangka melibatkan orangtua di wilayah binaan

2. Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dilaksanakan melalui kegiatan
 - a. Peningkatan Kapasitas bagi PKB dan PLKB
 - b. Sosialisasi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan bagi Ibu Hamil dan Keluarga yang memiliki anak usia sampai 2 (dua) tahun
 - c. Monitoring dan evaluasi kepada provinsi yang menjadi lokasi prioritas pencegahan *stunting*
 - d. Melakukan kegiatan bhakti sosial secara rutin sebulan sekali di wilayah binaannya masing-masing sebagai upaya pemantauan tumbuh kembang balita dan anak
 - e. Sosialisasi Materi Tumbuh Kembang Balita bagi Keluarga dan 1000 HPK yang memiliki anak usia sampai 6 (dua) tahun

3. Penyuluhan yang dilakukan Kader BKB secara terstruktur dan dilakukan pertemuan dalam jangka waktu ...
 - a. minimal 1 (satu) bulan sekali dengan mekanisme pelaksanaan pertemuan penyuluhan adalah waktu, tempat, dan jadwal materi penyuluhan
 - b. minimal 1 (satu) bulan sekali dengan mekanisme pelaksanaan pertemuan penyuluhan adalah materi, konsumsi, dan jadwal materi penyuluhan
 - c. minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan mekanisme pelaksanaan pertemuan penyuluhan adalah waktu, tempat, dan jadwal materi penyuluhan
 - d. minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan mekanisme pelaksanaan pertemuan penyuluhan adalah lokasi dan jadwal materi penyuluhan.
 - e. minimal 6 (enam) bulan sekali dengan mekanisme pelaksanaan pertemuan penyuluhan adalah waktu dan jadwal materi penyuluhan

4. Pembentukan dan pengembangan Kelompok BKB yang terdiri dari salah satu kegiatan di bawah ini antara lain ...
 - a. Pembentukan dan pengembangan Kader BKB
 - b. Pengadaan barang dan jasa untuk sarana BKB Kit
 - c. TOT bagi pengelola dan pelatih kepada para pelaksana dan pengelola program pada setiap jenjang wilayah dari Tingkat Pusat, Provinsi, sampai Kabupaten dan Kota.
 - d. Kerjasama dengan bidang kesehatan setempat yang dilakukan untuk mengembangkan Program Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak
 - e. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan terhadap pelaksanaan operasional dan keberlangsungan Program Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak

5. Salah satu Materi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan yang terdapat pada Modul BKB Emas yaitu ...

- a. Penerapan Peran Suami dalam masa 1000 HPK
- b. Kesehatan fisik dan mental Ibu Hamil dan Ibu Menyusui
- c. Pembiasaan Perilaku 3M bagi Ibu Hamil dan Keluarga Baduta
- d. Stimulasi perkembangan anak pada masa 1000 HPK
- e. Meningkatkan peran lingkungan dalam masa 1000 HPK

I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

• Umpan balik

Cocokkan hasil jawaban Evaluasi Saudara dengan rambu jawaban yang ada pada bagian akhir dari modul ini dan hitunglah jawaban yang benar. Kemudian gunakan formula seperti di bawah ini, untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara:

$$\frac{\text{Jumlah Soal yang dijawab Benar}}{\text{Jumlah Keseluruhan Soal}} \times 100\% = \text{Nilai Perolehan Peserta}$$

Skor Nilai Perolehan:

90%–100% = baik sekali

80%–89% = baik

70%–79% = cukup

60%–69% = kurang

>59% = kurang sekali

• Tindak Lanjut

Jika tingkat kategori penguasaan sudah baik, maka lanjutkanlah latihan dengan menerapkan pola diskusi dengan teman Saudara. Tetapi bila penguasaan Saudara masih dalam tingkat kategori cukup, maka cobalah mempelajari ulang seluruh materi Bab ini hingga penguasaan Saudara pada test formatif berada pada kategori Baik.

BAB IV

PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA REMAJA

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan pembinaan ketahanan remaja

A. Gambaran “Remaja” Dan Problematikanya

1. Pengertian

Secara terminologi, pada dasarnya “remaja” telah didefinisikan dalam berbagai pengertian. Namun secara umum, masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa seseorang menjadi dewasa. Tahun 1974, WHO memberikan pengertian remaja yang lebih konseptual, hal ini mencakup tiga kriteria yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Dikutip dari buku Remaja – SDKI 2017, perubahan biologis menekankan pada terjadinya masa pubertas yang mengubah bentuk tubuh anak-anak menjadi seorang remaja yang matang secara fisik dan seksual. definisi psikologis membedakan terminologi 'remaja' pada perubahan tugas-tugas yang harus dicapai, masing-masing berkaitan dengan tugas utama yaitu pencapaian identitas personal. Definisi sosiologis menjelaskan bahwa remaja adalah status di dalam suatu masyarakat, khususnya sebagai periode transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. (<http://site.sinauer.com/cobb/chapter01.html>, 3 April 2013).

Untuk membedakan kelompok remaja juga digunakan konsep umur menurut pertumbuhan fisiknya. Pengkategorian tersebut yakni seperti masa remaja 'awal' (11-13 tahun), remaja 'tengah' (14-18 tahun) dan remaja 'akhir' (19-24 tahun) (*The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 2008 dalam Buku Remaja- SDKI 2017). Kementerian Kesehatan Indonesia mendefinisikan ulang kelompok remaja sebagai

orang-orang yang hanya berumur 10–19 dan tidak kawin. Sedangkan menurut BKKBN kelompok umur remaja adalah 10–24 tahun dan tidak kawin (BKKBN, 2012).

Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk remaja (usia 10 – 24 tahun dan belum menikah) menurut Sensus Penduduk 2010 mencapai angka 63 juta jiwa atau sekitar 26 % dari total penduduk Indonesia. Meskipun pada SUPAS 2015 persentasenya menurun menjadi 25 persen, tetapi jumlahnya bertambah menjadi 65 juta jiwa atau 25% dari jumlah Penduduk Indonesia 255 juta (Bapenas, BPS, UNFPA 2013). Pada tahun 2021 berdasarkan sensus penduduk, jumlah remaja mencapai angka 74,93 juta jiwa dengan presentasi 27,94% dari total jumlah penduduk (SP, 2021). Artinya, 1 dari setiap 4 orang Penduduk Indonesia adalah remaja. BPS memprediksi akan menjadi 69 juta jiwa pada 2035 mendatang. Jumlah remaja yang cukup besar ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama agar para remaja tersebut nantinya dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia berkualitas yang dapat dijadikan sebagai aktor penentu pembangunan di Indonesia.

2. Remaja dan Problematikanya

Masa remaja merupakan periode transisi yang selalu dialami oleh setiap manusia yang berpindah dari anak-anak menuju ke usia dewasa. Pada dasarnya dalam masa transisi tersebut, remaja akan mulai banyak terpengaruh oleh berbagai faktor lingkungan dan biasanya sudah memiliki tokoh panutan ataupun sosok yang dijadikan sebagai cermin diri untuk bersikap dan berperilaku. Pada masa remaja, mulai ada rasa ingin meniru dan menduplikasi tokoh panutan atau sosok yang mereka idolakan seperti selebriti, penyanyi, politisi, tokoh agama, senior dan lain sebagainya.

Dalam konteks pembangunan manusia, pembinaan remaja memiliki peran yang strategis. Pertama, karena remaja merupakan individu-individu calon penduduk usia produktif yang pada saatnya kelak akan menjadi subjek/pelaku pembangunan sehingga harus disiapkan agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, karena remaja merupakan individu-individu calon pasangan yang akan membangun keluarga dan calon orangtua bagi anak-anak yang dilahirkannya sehingga perlu

disiapkan agar memiliki perencanaan dan kesiapan berkeluarga. Kesiapan berkeluarga merupakan salah satu kunci terbangunnya ketahanan keluarga dan keluarga yang berkualitas sehingga diharapkan mampu melahirkan generasi yang berkualitas. Dengan demikian, apabila gagal dalam membina remaja, bukan hanya menjadi ancaman kegagalan pembangunan (karena gagal menyiapkan aktor-aktor pembangunan), tetapi juga ancaman kegagalan kualitas generasi berikutnya (karena gagal dalam menyiapkan para calon orangtua). (Dithanrem, 2019).

Namun demikian kondisi remaja saat ini bukan tanpa tantangan. Masih ada permasalahan yang mengancam remaja, terutama yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan gizi yang akan berdampak pada kualitasnya sebagai aktor pembangunan dan kesiapannya dalam membangun keluarga. Pubertas/kematangan seksual yang semakin dini (aspek internal) dan aksesibilitas terhadap berbagai media serta pengaruh negatif sebaya (aspek eksternal) menjadikan remaja rentan terhadap perilaku seksual berisiko. Dengan demikian, remaja menjadi rentan mengalami kehamilan di usia dini, kehamilan di luar nikah, kehamilan tidak diinginkan, dan terinfeksi penyakit menular seksual hingga aborsi yang tidak aman (Dithanrem, 2019).

Saat berada pada usia remaja inilah terjadi perubahan-perubahan yang cepat dalam diri seorang remaja. Perubahan tersebut mulai dari aspek kognitif, emosi hingga aspek sosial. Kusumawati (2017) menjelaskan bahwa proses pematangan fisik yang terjadi pada remaja terjadi lebih cepat dari proses pematangan psikologinya. Hal inilah yang kemudian sering menyebabkan berbagai masalah dan persoalan yang dihadapi seseorang pada usia remaja. Di satu sisi remaja sudah merasa matang secara fisik dan ingin bebas dan mandiri. Di sisi lain mereka tetap membutuhkan bantuan, dukungan, serta perlindungan orangtua. Namun demikian, kadangkala orangtua sering tidak paham dengan perubahan yang terjadi pada remaja sehingga tidak jarang terjadi konflik di antara keduanya. Hal ini karena remaja merasa tidak memperoleh perhatian ataupun dihargai secara pribadi selanjutnya seringkali memperlihatkan tindakan agresif yang dapat mengarah pada perilaku yang negatif. Diantaranya perilaku negatif yang ditunjukkan oleh remaja antara lain pergaulan bebas dan kenakalan remaja.

Perilaku ini menunjuk pola tingkah remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

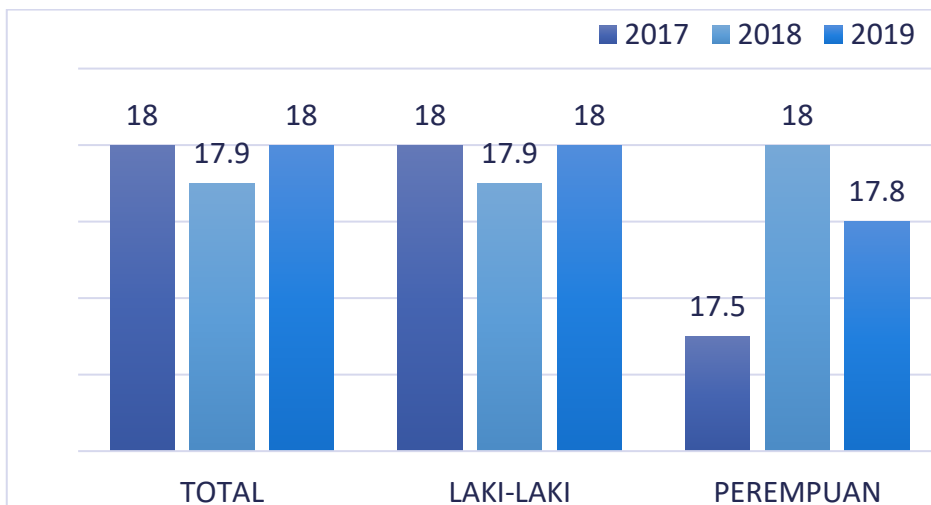
Dalam studi masalah sosial, problematika remaja yang menyebabkan berbagai bentuk perilaku yang negatif dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan pelaksanaan sistem sosial itu sendiri didalam masyarakat. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh, sehingga dengan demikian membuat perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Apabila kita melihat kepada kasus yang terjadi saat ini, problematika remaja sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak remaja yang sudah mengenal obat-obat terlarang, rokok, melakukan hubungan seks bebas, hingga terlibat dengan berbagai bentuk tindakan kriminal lainnya. Terkait dengan perilaku menyimpang, sangat memprihatikan bahwa banyak remaja-remaja disekitar kita yang terkait dengan kasus narkoba. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2014 menyebutkan, bahwa 22 % pengguna narkoba di Indonesia merupakan pelajar dan mahasiswa. Ironisnya, data tahun 2017 justru mengalami menjadi sekitar 27,32 % pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Angka tersebut kemungkinan meningkat kembali karena beredarnya sejumlah narkoba jenis baru. Angka tersebut baru muncul dalam kasus penyalahgunaan narkoba saja, belum lagi angka pernikahan di usia muda, angka aborsi di kalangan remaja yang juga relatif masih tinggi.

Merujuk pada data terkait hubungan seksual bebas yang dilakukan remaja, berdasarkan data SRPJMN 2017 dan SKAP 2018, diketahui bahwa dari responden penelitian yang diwawancarai, diperoleh data rata-rata usia remaja pertama kali melakukan hubungan seksual adalah 18 tahun pada tahun 2017, dan usia 17.9 tahun pada tahun 2018.

Diagram 4.1

Rata-rata umur pertama kali melakukan hubungan seksual



(Sumber: SRPJMN 2017, SKAP 2018–2019, BKKBN)

Berdasarkan data SKAP 2019, diketahui bahwa hampir setengah dari total remaja yang diwawancarai mengaku pernah berpacaran. Proporsi remaja pria lebih tinggi dibandingkan dengan remaja wanita yang mengatakan pernah berpacaran. Pada kelompok umur 20–24 tahun lebih banyak yang menyatakan pernah berpacaran dibandingkan 10–14 tahun dan 15–19 tahun. Median usia pertama kali berpacaran, baik remaja pria maupun wanita adalah 15 tahun, tidak ada perbedaan yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan. Pola perilaku pacaran umumnya berpelukan, berciuman bibir, dan meraba. Perilaku seperti tersebut cenderung lebih banyak dilakukan pada remaja wanita diperkotaan dibandingkan di perdesaan. Sebesar 2 % remaja pria dan 1 % wanita yang menyatakan pernah melakukan hubungan seksual pra nikah dan terdapat pada semua kelompok umur, namun persentase pada kelompok umur 10–14 tahun sangat rendah. Remaja pria lebih bersikap setuju terhadap hubungan seksual sebelum nikah dibanding remaja wanita. Median usia pertama kali melakukan hubungan seksual pra nikah pada remaja usia 18 tahun.

Meskipun tidak seluruh remaja mengalami fenomena problematika perilaku menyimpang, namun demikian, pemerintah, masyarakat dan orang tua serta

lingkungan harus memiliki concern terhadap kondisi remaja Indonesia saat ini. Hal ini merupakan upaya antisipatif agar tetap berperilaku yang wajar dan selalu berada dalam koridor batas aman dalam transisi kehidupannya. Kusumastuti (2017) menjelaskan bahwa berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh remaja disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) kurangnya kasih sayang orang tua.
- 2) kurangnya pengawasan dari orang tua.
- 3) pergaulan dengan teman yang tidak sebaya.
- 4) peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif.
- 5) tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah.
- 6) dasar-dasar agama yang kurang
- 7) tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya
- 8) kebebasan yang berlebihan serta masalah yang terpendam

Selain perilaku penyimpang, permasalahan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga menjadi isu strategis yang mendapat perhatian khusus dalam RPJMN 2015- 2019 lalu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019. Salah satu fokus pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 2015-2019 saat itu adalah peningkatan pembinaan ketahanan remaja. Hal ini penting karena sangat terkait dengan upaya pengendalian jumlah kelahiran dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan.

Sasaran strategis Program Bangga Kencana terkait remaja yang harus dicapai antara lain peningkatan indeks pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana, peningkatan median usia kawin pertama perempuan dan penurunan angka kelahiran pada wanita usia subur 15-19 tahun.

Generasi Berencana (GenRe) sendiri dalam program Bangga Kencana, didefinisikan sebagai remaja yang berperilaku hidup sehat, terhindar dari risiko Triad KRR (Seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA), menunda usia perkawinan, bercita-cita

mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, model dan sumber informasi bagi teman sebayanya. GenRe merupakan arah kebijakan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR). Program PKBR dirancang sebagai respon karena masih banyaknya pernikahan usia dini; perilaku seksual pranikah; dan penyalahgunaan NAPZA (Generasi Indonesia, 2018).

Beberapa permasalahan Program Bangga Kencana terkait remaja yang masih dihadapi saat ini antara lain (SKAP, 2019):

- 1) Masih rendahnya remaja yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern;
- 2) Masih rendahnya indeks pengetahuan tentang Generasi Berencana;
- 3) Masih rendahnya persentase remaja yang mengetahui isu kependudukan;
- 4) Masih rendahnya remaja yang mendapatkan informasi program BANGGA KENCANA melalui media massa (cetak, elektronik), media luar ruang, dan media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, dan media tradisional);
- 5) Masih rendahnya remaja yang mendapatkan informasi program BANGGA KENCANA melalui tenaga lini lapangan.

Baik dan buruknya kualitas remaja di Indoensia banyak dipengaruhi oleh lingkungan tempat remaja berada, termasuk orang tua dan keluarga. Oleh karena itulah remaja harus mempunyai cukup bekal pengetahuan dalam menjalani kehidupannya dengan terencana.

3. Remaja dan Keluarga

Keluarga merupakan wadah pertama dan utama untuk pendidikan anak, termasuk pendidikan karakter. Indonesia diperkirakan akan menghadapi bonus demografi pada 2035 hingga 2040 mendatang. Jumlah penduduk usia remaja yang besar yang mencapai angkat 74,93 juta jiwa (SP, 2021), tentunya menjadi peluang

sekaligus tantangan besar terhadap pencapaian bonus demografi ini. Pada 2035 nanti, generasi muda saat ini lah yang akan memimpin bangsa sehingga baik masyarakat, pemerintah dan keluarga tentunya perlu memberikan perhatian khusus terhadap keluarga. Untuk menciptakan keluarga berkualitas, remaja memiliki peran yang cukup tinggi.

Remaja berada di posisi terdepan dalam pintu kehidupan berkeluarga sekaligus penentu berkualitas atau tidaknya sebuah keluarga. Dalam keluarga yang berkualitas, orang tua perlu memiliki pendidikan dan karier yang baik. Orang tua juga harus serta memahami tugas mengingat masih banyak pasangan suami istri yang belum memahami peran dan fungsinya sebagai orang tua. Oleh sebab itu BKKBN menyiapkan remaja ini sebagai keluarga yang berencana melalui program ketahanan keluarga remaja dan program lainnya terkait remaja. Apabila remaja telah memahami pentingnya keluarga yang berencana, maka keluarga yang berkualitas dapat lebih mudah terwujud. Namun demikian, terciptanya keluarga berkualitas memerlukan pendekatan yang tidak instant. Perlu persiapan dan perencanaan yang baik.

Keluarga yang menjadi wadah utama perkembangan karakter anak, tentu sangat berpengaruh dalam kehidupan remaja Indonesia. Setiap keluarga perlu menerapkan 8 (delapan) fungsi keluarga, yang terdiri dari: 1. Fungsi Agama 2. Fungsi Sosial Budaya 3. Fungsi Cinta Kasih 4. Fungsi Perlindungan 5. Fungsi Reproduksi 6. Fungsi Pendidikan 7. Fungsi Ekonomi 8. Fungsi Lingkungan. Keluarga yang berketahanan dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dapat menjadi landasan dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. Orang tua harus mampu menjadi panutan dan pembimbing yang baik bagi remaja, yang saat ini berada pada usia transisi. Dalam masa transisi tersebut tak jarang para remaja mengarah kepada konflik negatif jika tidak ada pendampingan baik dari teman sebaya ataupun pengetahuan serta pembekalan yang cukup dari orang tua. Sehingga nantinya diharapkan pendampingan yang baik dari keluarga, dalam hal ini orang tua tentunya akan berpengaruh dalam menciptakan remaja yang berkualitas.

B. Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja

Dalam upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan manusia, pada hakikatnya Pembinaan Ketahanan Remaja memiliki peran yang sangat strategis. Faktor-faktor yang membuat pembinaan ketahanan keluarga ini menjadi strategis antara lain:

- 1) Remaja merupakan individu-individu calon penduduk usia produktif yang pada saatnya kelak akan menjadi subjek/pelaku/aktor pembangunan sehingga harus disiapkan agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
- 2) Remaja merupakan individu-individu calon pasangan yang akan membangun keluarga dan calon orangtua bagi anak-anak yang dilahirkannya sehingga perlu disiapkan agar memiliki perencanaan dan kesiapan berkeluarga.

Kesiapan dalam membangun kehidupan berkeluarga merupakan salah satu kunci terwujudnya ketahanan keluarga dan keluarga yang berkualitas sehingga diharapkan mampu melahirkan generasi yang juga berkualitas. Apabila sebuah keluarga gagal dalam membina ketahanan remaja, bukan hanya menjadi ancaman kegagalan pembangunan tetapi juga menjadi ancaman kegagalan kualitas generasi berikutnya, karena turut mengalami kegagalan dalam menyiapkan para calon orangtua). Melalui BAB ini maka perlu kita ketahui, apa sesungguhnya program Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja yang diusung oleh BKKBN.

1. Pengertian

Pembinaan Ketahanan Remaja merupakan bagian dari kebijakan Pembangunan Keluarga yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mampu melangsungkan (1) jenjang pendidikan secara terencana, (2) berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan (3) menikah dengan penuh perencanaan sesuai fase reproduksi sehat.

UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: "Kebijakan Pembangunan Keluarga dilakukan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal (pasal 47)... (yang salah satunya dilaksanakan) dengan cara peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga (pasal 48)". Pembinaan Ketahanan Remaja juga sejalan dengan Kebijakan Keluarga Berencana (KB) untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas (pasal 20 UU Nomor 52 Tahun 2009) dengan membantu remaja sebagai calon pasangan suami-istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksinya secara bertanggungjawab tentang (1) usia ideal perkawinan, (2) usia ideal melahirkan, (3) jumlah ideal anak, (4) jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi (pasal 21 UU Nomor 52 Tahun 2009). Oleh karena itu, Pendewasaan Usia Perkawinan dengan kampanye usia ideal menikah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki menjadi salah satu substansi dalam Pembinaan Ketahanan Remaja.

Gambar 4.1

Fase Perencanaan Kehamilan Terbaik



Sumber: BKKBN, 2016

2. Sasaran dan hasil yang diharapkan

Sasaran yang dituju terkait dengan program pembinaan ketahanan keluarga remaja ini tentunya adalah remaja. Sesuai dengan konsep *young people* yang dikeluarkan oleh PBB (dalam *World Youth Report, 2005*), remaja sasaran Program Pembinaan Ketahanan Remaja pada Program Bangga Kencana adalah penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, sedang mengenyam pendidikan maupun tidak, termasuk remaja berkebutuhan khusus, yang berusia 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah.

Gambar 4.2

Remaja Indonesia



Selanjutnya output yang dihasilkan adalah remaja Generasi Berencana (Genre), yaitu remaja yang memiliki perencanaan dalam mempersiapkan dan melewati 5 (lima) transisi kehidupan remaja dengan (1) mempraktikkan hidup bersih dan sehat, (2) melanjutkan pendidikan, (3) memulai berkarir, (4) menjadi anggota masyarakat yang baik, serta (5) membangun keluarga yang berkualitas. Agar remaja mampu melewati lima transisi kehidupannya, mereka diharapkan terhindar dari (1) hubungan seksual sebelum menikah, (2) menikah di usia dini, dan (3) penyalahgunaan NAPZA.

Gambar 4.3

Lima Transisi Kehidupan Remaja



3. Program Generasi berencana (GenRe)

Seperti yang telah diketahui, pengertian dari PIK Remaja/Mahasiswa adalah suatu wadah dalam program Gen Re yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, sedangkan Bina Keluarga Remaja adalah suatu kelompok / wadah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja. Dengan kata lain, PIK R dan BKR mempunyai sasaran yang berbeda, karena PIK-R lebih mengarah ke remaja langsung sedangkan BKR lebih kepada pendekatan pengembangan kompetensi keluarga yang memiliki anak berusia Remaja.

Dalam memfasilitasi kedua sasaran tersebut, BKKBN membuat sebuah program dengan tema Program Genre (Generasi Remaja). Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga mereka mampu melaksanakan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program GenRe adalah program yang mengedepankan pembentukan

karakter bangsa dikalangan generasi muda. Program GenRe merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah dan NAPZA guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Program GenRe adalah suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Program Genre diperlukan dalam pendekatan kepada sasaran remaja Sebagai informasi yang berkaitan dengan penyiapan diri remaja menyongsong kehidupan berkeluarga yang lebih baik, menyiapkan pribadi yang matang dalam membangun keluarga yang harmonis dan memantapkan perencanaan. Sasaran dari Program GenRe adalah remaja (10–24 tahun) dan belum menikah, mahasiswa/mahasiswi belum menikah, keluarga / keluarga yang punya remaja, masyarakat peduli remaja. (Buku Kompilasi Materi PKB Keterampilan, 2021).

Program Genre berbasis pada TRIAD KRR yaitu pemberantasan seksualitas, HIV dan AIDS serta NAPZA serta menunjang proram pendidikan keterampilan hidup (*Life Skills Education*), penyetaraan gender dan keterampilan dalam mengadvokasi serta KIE, sehingga pelaksana program Genre lebih diarahkan kepada PIK–R sebagai konselor sebaya mereka dan Kader BKR sebagai pengadvokasi serta penunjang program lainnya kepada orang tua yang memiliki anak usia remaja.

BKKBN memunculkan program GenRe bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja Indonesia agar menjadi generasi yang punya perencanaan kehidupan yang matang. Program dan rencana pelayanan kepada masyarakat berganti seiring perubahan fokus. Inilah yang melatarbelakangi dibentuknya GenRe yang membidik remaja dan generasi muda. Melalui GenRe, remaja diedukasi soal usia ideal menikah minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk

laki-laki. Dengan pendewasaan usia ini, generasi muda Indonesia mampu membentuk generasi mendatang yang unggul dan sehat, menempuh pendidikan tinggi, mengembangkan karier, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program GenRe dibuat untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

4. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja)

Di dalam program GenRe dikembangkan materi-materi diantaranya adalah Kesehatan Reproduksi Remaja, *Life Skill*, Penyiapan Kehidupan Berkeluarga, serta Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program GenRe dilaksanakan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dengan pendekatan dari, oleh dan untuk remaja sesuai dengan kecenderungan remaja yang lebih menyukai bercerita tentang permasalahannya dengan teman sebaya.

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) adalah wadah dalam program GenRe, yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. PIK-Remaja berada di jalur pendidikan (sekolah-sekolah dan perguruan tinggi) serta di jalur masyarakat (komunitas remaja). Pengembangan kelompok PIK Remaja/Mahasiswa dengan menjadikan remaja sebagai pengelola, pendidik dan konselor sebaya sehingga kelompok ini dikelola dari, oleh, dan untuk remaja/mahasiswa. PIK Remaja/Mahasiswa yaitu suatu wadah yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja dalam memperoleh informasi dan pelayanan konseling tentang kesehatan reproduksi. PIK Remaja/Mahasiswa adalah suatu wadah dalam program Gen Re, sedangkan Bina Keluarga Remaja adalah suatu kelompok / wadah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja. Dengan kata lain, PIK R dan BKR mempunyai sasaran yang berbeda, karena PIK-R lebih mengarah ke remaja langsung sedangkan BKR lebih kepada pendekatan pengembangan kompetensi keluarga yang memiliki anak

berusia Remaja. Keberadaan dan peranan PIK Remaja/Mahasiswa di lingkungan remaja sangat penting artinya dalam membantu remaja untuk mendapatkan informasi dan pelayanan konseling yang cukup dan benar tentang Program GenRe. Seperti diketahui bahwa akses dan kualitas pengelolaan dan pelayanan PIK Remaja/Mahasiswa masih relatif rendah. Untuk peningkatan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan PIK Remaja/Mahasiswa. (Buku Kompilasi Materi PKB Keterampilan, 2021).

Pada saat ini PIK Remaja yang tersebar di 34 Provinsi yang diharapkan menjadi wadah bagi remaja untuk berkumpul, berbagi cerita, berkreatifitas dan saling tukar informasi. PIK Remaja dikembangkan melalui jalur pendidikan dan masyarakat. Jalur pendidikan meliputi sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren. Di jalur masyarakat diantaranya melalui organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan komunitas remaja. Kedua jalur tersebut merupakan sasaran yang penting untuk mendekati komunitas remaja.

Tujuannya dibentuknya PIK-R adalah untuk menyiapkan dan memberdayakan SDM (Pengelola, Pendidik Sebaya, dan Konselor Sebaya) baik yang baru tumbuh maupun untuk mengganti SDM yang sudah tidak aktif lagi dengan berbagai sebab (regenerasi). 114 Buku Kompilasi Materi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Bagi Penyuluh Keluarga Berencana Keterampilan Pengelolaan PIK Remaja/mahasiswa adalah remaja/ mahasiswa berusia maksimal 24 tahun, belum menikah dan punya komitmen dalam mengelola dan melaksanakan PIK Remaja/mahasiswa terdiri dari ketua, Sekretaris, Bendahara, dan ketua bidang. Pengelola PIK R/M bisa dari Pendidik Sebaya maupun Konselor Sebaya.

Dalam rangka meningkatkan sosialisasi dan promosi program GenRe, khususnya pengembangan PIK Remaja sebagai sebuah wadah pelayanan informasi dan konseling, maka diperlukan figur motivator dari kalangan remaja. Figur motivator inilah yang akan menjadi wakil atau Duta GenRe. Dengan adanya Duta GenRe, sosialisasi dan promosi program GenRe di lingkungan remaja akan lebih efektif karena komunikasi yang terjalin dilakukan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk remaja sehingga menjadi ramah

remaja. Disamping itu, di lingkungan remaja secara umum, ikon Duta GenRe dirasa memberi nilai lebih dalam hal sosialisasi dan promosi program GenRe.

Selanjutnya untuk langkah-langkah dan ketentuannya lainnya dalam proses kegiatan yang terdapat dalam PIK-R, Anda dapat membaca lebih lengkap pada Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R) melalui Direktorat Ketahanan Remaja BKKBN.

5. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Keluarga melalui pola asuh orang tua, telah diidentifikasi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pembentukan karakter remaja, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Proses pola asuh orang tua meliputi kedekatan orang tua dengan remaja, pengawasan orang tua, dan komunikasi orang tua dengan remaja. Melalui komunikasi, orang tua hendaknya menjadi sumber informasi dan pendidik utama tentang kesehatan reproduksi remaja, juga tentang perencanaan kehidupan remaja dimasa yang akan datang. Namun demikian, orang tua sering menghadapi kendala dalam berkomunikasi kepada remajanya, begitupun sebaliknya (BKKBN, 2013).

Program Bina Keluarga Remaja merupakan salah satu program yang dikembangkan BKKBN dalam upaya menciptakan ketahanan keluarga dan mewujudkan peningkatan kualitas remaja sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dimana dalam pengelolaan programnya didasarkan pada peraturan Kepala BKKBN nomor 109/PERF2/2012.

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) potensial melalui upaya meningkatkan terwujudnya pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua dalam keluarga. BKR adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja, untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam

pengasuhan dan pembinaan remaja sehingga dapat memahami remaja, permasalahan remaja, dan dapat melakukan komunikasi efektif dengan remaja. BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok kegiatan dimana orang tua mendapatkan informasi dalam meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dengan dibantu oleh fasilitator dan kader. Adapun tujuan dibentuknya Bina Keluarga Remaja adalah Untuk terwujudnya kepedulian dan tanggungjawab orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak & remaja melalui interaksi yang harmonis. Pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat membantu orang tua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Melalui kelompok BKR setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja.

Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun. Selain itu BKR juga sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran antara keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga bisa memberikan pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama. Dengan adanya pengembangan kelompok BKR ini juga bisa membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Bentuk kegiatan yang dilakukan BKR adalah dengan mengumpulkan para orangtua yang mempunyai anak remaja. Melalui kelompok BKR, setiap keluarga yang memiliki remaja dapat menjalin komunikasi dan saling bertukar informasi serta berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja, antara lain: perencanaan keluarga penanaman nilai-nilai moral melalui 8 fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, TRIAD KRR (seksualitas, Napza dan HIV/AIDS), keterampilan hidup, kesetaraan gender, komunikasi efektif orangtua dengan remaja, peran orangtua dalam pembinaan tumbuh kembang remaja,

kebersihan dan kesehatan diri remaja dan pemenuhan gizi remaja. (Buku Kompilasi Materi PKB Keterampilan, 2021).

Biasanya kegiatan ini dilakukan selama sebulan sekali untuk diberikan pendidikan, pelatihan dan pengetahuan seputar permasalahan dan cara mengatasi permasalahan remaja. BKR hadir untuk memberikan pengetahuan agar remaja Indonesia bisa mempersiapkan dalam membangun keluarga yang terencana. Agar terbentuknya keluarga terencana yang harmonis tentu dibutuhkan adanya komunikasi yang baik berlandaskan asas musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, peran orangtua sangat penting dalam memahami perkembangan anaknya dalam mencapai tahapan tertentu yang akan menghantarkan mereka untuk siap dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Itulah mengapa penting mengikuti edukasi kelompok BKR, agar para orangtua bisa mengetahui seluk beluk permasalahan remaja dan bagaimana cara mengasainya untuk bisa menciptakan keluarga yang berkualitas dan terencana.

Selanjutnya untuk langkah-langkah dan ketentuannya lainnya dalam proses kegiatan yang terdapat dalam BKR, Anda dapat membaca lebih lengkap pada Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) melalui Direktorat Ketahanan Remaja BKKBN.

C. Rangkuman

Remaja merupakan aset sebuah bangsa dalam menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Untuk menghasilkan generasi remaja yang berkualitas tentu memerlukan upaya yang mendasar agar remaja dapat menjalankan aktivitas mereka dengan baik dan bermanfaat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas remaja adalah dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui Program Pembinaan Ketahanan Remaja. Pendekatan program pembinaan ketahanan remaja ini dilakukan BKKBN kepada remaja dan orang tua serta keluarga melalui wadah PIK- Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR).

Dalam konteks Pembangunan Manusia, Pembinaan Remaja memiliki peran yang strategis. Pertama, karena remaja merupakan individu-individu calon penduduk usia produktif yang pada saatnya kelak akan menjadi subjek/pelaku pembangunan sehingga harus disiapkan agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, karena remaja merupakan individu-individu calon pasangan yang akan membangun keluarga dan calon orangtua bagi anak-anak yang dilahirkannya sehingga perlu disiapkan agar memiliki perencanaan dan kesiapan berkeluarga.

UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: “Kebijakan Pembangunan Keluarga dilakukan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal (pasal 47)... (yang salah satunya dilaksanakan) dengan cara peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga (pasal 48)”. Pembinaan Ketahanan Remaja juga sejalan dengan Kebijakan Keluarga Berencana (KB) untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas (pasal 20 UU Nomor 52 Tahun 2009) dengan membantu remaja sebagai calon pasangan suami-istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksinya secara bertanggungjawab tentang (1) usia ideal perkawinan, (2) usia ideal melahirkan, (3) jumlah ideal anak, (4) jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi (pasal 21 UU Nomor 52 Tahun 2009). Oleh karena itu, Pendewasaan Usia Perkawinan dengan kampanye usia ideal menikah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki menjadi salah satu substansi dalam Pembinaan Ketahanan Remaja.

D. Latihan

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Menurut Saudara, bagaimana kondisi remaja Indonesia, terutama pada era digital saat ini?
2. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan program pembinaan ketahanan remaja dan tujuan dibentuknya program tersebut?

3. Uraikanlah bagaimana cara pendekatan dan Implementasi Pembinaan Ketahanan Remaja yang dilakukan oleh BKKBN!
4. Jelaskan fungsi dibentuknya Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)!
5. Jelaskan tujuannya dibentuknya PIK-R!

E. Evaluasi Formatif

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih A, B, C, D atau E pada jawaban yang menurut Saudara paling tepat!

1. Berdasarkan data SKAP 2019 maka permasalahan Program Bangga Kencana terkait remaja yang masih dihadapi saat ini antara lain ...
 - a. Masih rendahnya remaja yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi tradisional
 - b. Masih rendahnya indeks pengetahuan tentang 1000 HPK
 - c. Masih rendahnya persentase remaja yang mengetahui isu kependudukan
 - d. Masih rendahnya remaja yang mendapatkan informasi program Bangga Kencana melalui media massa
 - e. Masih rendahnya remaja yang mendapatkan informasi program Bangga Kencana melalui tenaga lini lapangan
2. Pengembangan kelompok PIK Remaja/Mahasiswa memiliki arah dan tujuan yaitu...
 - a. Menjadikan remaja sebagai pengelola, pendidik dan konselor sebaya
 - b. Membentuk generasi millennial yang berencana
 - c. Membentuk remaja yang bebas dari pengaruh media sosial yang negatif
 - d. Menjadikan remaja yang mampu mendampingi keluarga Indonesia
 - e. Menjadikan remaja yang sadar akan TRIAD KRR

3. Program GenRe mengembangkan materi-materi diantaranya adalah ...
 - a. Pencegahan Perkawinan Usia Anak
 - b. Keterampilan Hidup (*Lifeskills*)
 - c. Penyiapan Kehidupan Berkeluarga khususnya Pencegahan *Stunting*
 - d. Aplikasi Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL)
 - e. Pendampingan Keluarga yang Memiliki Remaja

4. Berdasarkan para ahli maka terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh remaja disebabkan hal sebagai berikut...
 - a. kelebihan kasih sayang orang tua
 - b. peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif
 - c. tidak adanya bimbingan konseling dari sekolah
 - d. radikalisme dalam beragama
 - e. kebebasan berekspresi yang melanggar UU ITE

5. BKKBN mengembangkan Program Genre berbasis pada TRIAD KRR, kecuali ...
 - a. pengidentifikasian orientasi seksualitas remaja
 - b. HIV dan AIDS serta NAPZA
 - c. proram pendidikan keterampilan hidup (*Life Skills Education*)
 - d. penyetaraan gender dan keterampilan dalam mengadvokasi serta KIE
 - e. Pelaksana program Genre lebih diarahkan kepada PIK-R sebagai konselor sebaya

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

- **Umpan balik**

Cocokkan hasil jawaban Evaluasi Saudara dengan rambu jawaban yang ada pada bagian akhir dari modul ini dan hitunglah jawaban yang benar. Kemudian gunakan formula seperti di bawah ini, untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara:

$$\frac{\text{Jumlah Soal yang dijawab Benar}}{\text{Jumlah Keseluruhan Soal}} \times 100\% = \text{Nilai Perolehan Peserta}$$

Skor Nilai Perolehan:

90%-100% = baik sekali

80%-89% = baik

70%-79% = cukup

60%-69% = kurang

>59% = kurang sekali

- **Tindak Lanjut**

Jika tingkat kategori penguasaan sudah baik, maka lanjutkanlah latihan dengan menerapkan pola diskusi dengan teman Saudara. Tetapi bila penguasaan Saudara masih dalam tingkat kategori cukup, maka cobalah mempelajari ulang seluruh materi Bab ini hingga penguasaan Saudara pada test formatif berada pada kategori Baik.

BAB V

PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA LANSIA RENTAN

*Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan
pembinaan ketahanan keluarga lansia rentan*

A. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)

Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan kelompok kegiatan di masyarakat sebagai wadah komunitas keluarga Lansia dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dalam rangka mewujudkan Lansia Tangguh. Sasaran BKL meliputi keluarga Lansia dan Lansia dengan wilayah sasaran tingkat dusun dan/atau rukun warga. Pembentukan BKL dapat dilakukan oleh Penyuluh KB, PLKB, IMP dan/atau bersama mitra kerja dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 2 (dua) orang Kader.

Tahapan Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), antara lain:

1. melakukan pemetaan wilayah dan mengkompilasi data kependudukan yang berkaitan dengan kelanjutusiaan dari hasil penelitian dan laporan rutin;
2. melakukan pemetaan potensi, sumber daya, dan sarana yang dimiliki;
3. penggalangan kesepakatan dilaksanakan oleh Penyuluh KB/PLKB dan IMP dan/atau bersama Mitra Kerja;
4. menyusun kepengurusan Poktan BKL; dan
5. pengesahan pembentukan Poktan BKL

Pelaksanaan BKL dilakukan oleh kader, Penyuluh KB/ Penyuluh Lapangan KB, tokoh agama, tokoh adat dan mitra kerja lain. Kegiatan BKL terdiri atas kegiatan utama dan pengembangan, yang dijelaskan sebagai berikut. Adapun kegiatan utama antara lain:

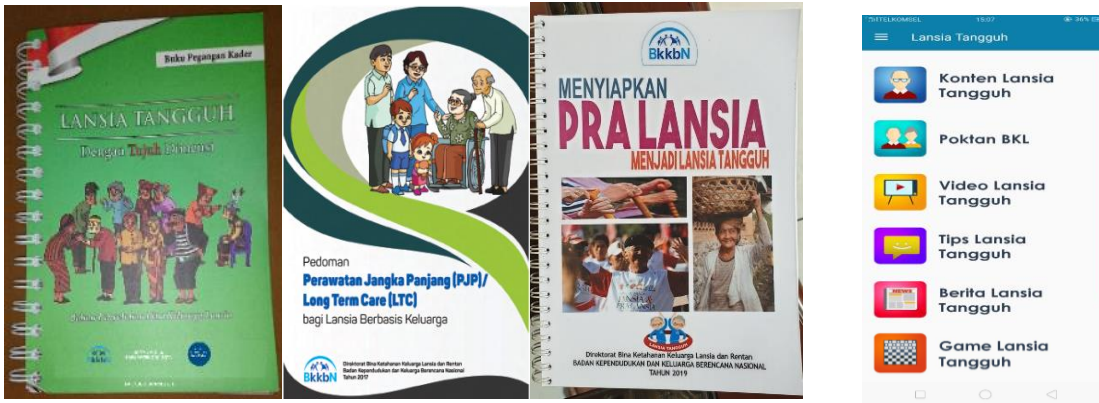
1. Penyuluhan, meliputi materi pembangunan Keluarga Lansia Tangguh dan materi kelanjutusiaan sesuai dengan budaya kearifan local.
2. Kunjungan rumah, merupakan pembimbingan langsung kepada Keluarga Lansia, khususnya yang tidak hadir dalam pertemuan penyuluhan selama 2 (dua) kali berturut-turut.
3. Pendampingan, merupakan kegiatan pendampingan bagi Lansia yang memiliki gangguan dan atau permasalahan yang berkaitan dengan 7 (tujuh) dimensi Lansia Tangguh dan atau pendampingan perawatan jangka panjang bagi Lansia yang memiliki gangguan status fungsional fisik, mental dan kognitif yang cenderung berkurang dengan bertambahnya usia.
4. Rujukan, merupakan kegiatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi anggota BKL.
5. Pencatatan dan pelaporan.

Kegiatan pengembangan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penerapan 7 (tujuh) dimensi Lansia Tangguh, paling sedikit berupa:

1. menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan fisik antara lain olahraga, penyediaan makanan tambahan;
2. kegiatan sosial kemasyarakatan, bina lingkungan dan kegiatan keagamaan;
3. kegiatan peningkatan pendapatan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, usaha peningkatan pendapatan keluarga, dan koperasi; dan penguatan kemitraan.

Materi penyuluhan Bina Keluarga Lansia sebagai berikut:

1. Buku Pegangan Kader 7 Dimensi Lansia Tangguh
2. Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia
3. Media Partisipatif Lansia Tangguh (BKL Kit)
4. Video Tutorial Media Partisipatif Lansia Tangguh (BKL Kit)
5. Menyiapkan PraLansia menjadi Lansia Tangguh
6. *Mobile Apps* Lansia Tangguh (Golantang)



B. Media Partisipatif (BKL Kit) 7 Dimensi Lansia Tangguh

Media Partisipatif Penyuluhan Lansia Tangguh

<p>Dimensi Spiritual</p> <p>Potongan Ganda Lansia Bertaqwa dan Bersyukur</p>	<p>Dimensi Intelektual</p> <p>Poster Lipat Lansia Tanggap dan Cerdas</p>	<p>Dimensi Fisik</p> <p>Beberan Tangga Lansia Sehat dan Produktif</p>	<p>Dimensi Emosional</p> <p>Poster Seri Terbuka Lansia Mantap dan Berdaya</p>
<p>Dimensi Sosial Kemasyarakatan</p> <p>Apron Lansia Peduli dan Aktif</p>	<p>Dimensi Profesional Vokasional</p> <p>Kartu Ajaib Lansia Handal dan Trampil</p>	<p>Dimensi Lingkungan</p> <p>Beberan Lansia Ramah dan Nyaman</p>	

C. Pendampingan Lansia

Pendampingan Lansia merupakan proses pemberian bantuan dan dukungan jangka panjang kepada lansia yang tidak mampu merawat dirinya sendiri baik sebagian maupun total, karena mempunyai keterbatasan dalam aspek fisik dan atau mental, yang diberikan oleh *caregiver* informal maupun professional. Tujuan

pendampingan perawatan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dalam keluarga melalui perawatan jangka panjang dalam kelompok BKL. Manfaat perawatan PJP diharapkan keluarga yang tinggal bersama lansia dapat memberikan pelayanan perawatan jangka panjang bagi lansia secara optimal di rumah.

Indikasi Pendampingan PJP Lansia yang memerlukan perawatan jangka panjang adalah:

1. Mereka yang mengalami ketergantungan sedang dan berat, diukur berdasarkan pengukuran *Activity of Daily Living* (ADL) dengan menggunakan indeks bartel
2. Mereka yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktifitas sehari-hari secara instrumental (*Instrumental Activity of Daily Living/IADL*)
3. Mereka yang mengalami berbagai penyakit berat termasuk stroke, demensia, depresi berat, penyakit jiwa, pasca jatuh, terutama yang mengalami penyakit dua atau lebih (pasien geriatri).
4. Mereka yang mengalami gangguan yang sedang dan berat dalam lingkup sindroma geriatri seperti: immobility, instabilitas, incontenensia urin, incontenensia alvi, gangguan intelektual, gangguan penglihatan dan pendengaran, infeksi, kecenderungan mengurung diri (isolasi), malnutrisi, keterbatasan keuangan, dampak dari mengkonsumsi obat-obatan, sulit tidur, penurunan daya tubuh, dan impotence/disfungsi ereksi.

Pencegahan dalam Perawatan Jangka Panjang dilakukan guna pencegahan bagi lansia yang berindikasi untuk mendapatkan perawatan jangka panjang dengan cara:

1. Melakukan kontrol kesehatan secara rutin
2. Keluarga sebaiknya melakukan kontrol kesehatan bagi lansia minimal 1 bulan sekali, baik ke Posyandu lansia maupun ke Puskesmas terdekat
3. Kehidupan rohani
4. Pemenuhan nutrisi pada lansia
5. Tidur yang cukup dan nyenyak
6. Melakukan senam otak

7. Menjaga kebersihan badan termasuk gigi dan mulut
8. Melakukan rehabilitasi bagi lansia yang membutuhkan rehabilitasi
9. Bersosialisasi dengan masyarakat termasuk lansia lainnya
10. Melakukan kegiatan sesuai minat dan hobi termasuk kesenian
11. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan budaya di mana lansia tinggal

D. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Salah bentuk implementasi amanat undang-undang tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) membentuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dalam rangka menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia. PPKS merupakan wadah berbasis institusi dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), konsultasi dan konseling, pembinaan, serta rujukan. Salah satu upaya BKKBN untuk mendekatkan PPKS dengan masyarakat adalah dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pembentukan PPKS di tingkat kecamatan yang diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 141/PER/F3/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera pada Balai Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Kecamatan.

Dengan semakin banyaknya permasalahan di keluarga yang muncul ke permukaan, tidak bisa kita anggap sebagai hal yang sederhana karena kondisi keluarga yang rentan atau tidak berkualitas akan berdampak pada setiap sendi kehidupan manusia. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan penduduk yang berkualitas. Keluarga yang memiliki ketahanan yang kuat merupakan landasan terciptanya kualitas hidup keluarga. Secara umum, ketahanan keluarga adalah terpenuhinya segala kebutuhan keluarga baik kebutuhan materiil maupun kebutuhan moril dan spiritual. BKKBN telah melakukan

berbagai upaya untuk menciptakan keluarga yang berkualitas melalui berbagai macam program yang mengikuti siklus hidup manusia. Namun ternyata hal ini masih dianggap kurang karena belum adanya suatu layanan secara terpadu yang dapat membantu keluarga mengatasi permasalahan yang dihadapi. Untuk itu maka dibentuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang hadir ditengah keluarga untuk pelayanan keluarga. Keberadaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera untuk mengatasi banyaknya permasalahan di lingkungan sosial yang disebabkan oleh ketidaktahuan keluarga dalam menjalankan fungsinya. (Dithanlan: Panduan PPKS, 2021)

Menurut buku Panduan PPKS (2021), Pemberian pelayanan konseling langsung pada keluarga adalah merupakan salah satu bentuk implementasi nyata, membangun kualitas penduduk karena penduduk sebagai modal dasar pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Diharapkan melalui PPKS, pemerintah dapat membenahi kondisi-kondisi diatas yang dimulai dari keluarga. Apabila keluarga memiliki tempat untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam keluarganya maka akan dapat meminimalisir terjadinya dampak akibat adanya permasalahan di dalam keluarga di Indonesia. Melalui PPKS diharapkan dapat langsung mengacu kepada sasaran yaitu keluarga dengan pendekatan konsultasi dan konseling bagi keluarga dan anggota keluarganya. Guna mencapai tujuan tersebut, BKKBN menyelenggarakan kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang memberikan minimal delapan jenis pelayanan, meliputi:

1. Pelayanan data dan informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga,
2. Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak,
3. Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja,
4. Konsultasi dan Konseling Pra Nikah,
5. Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
6. Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis,
7. Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia,
8. Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

PPKS hadir sampai tingkatan kecamatan dengan tujuan untuk mempermudah keluarga mengakses layanan. PPKS di tingkatan kecamatan menggunakan Balai Penyuluhan (BP) Keluarga Berencana sebagai tempat pelaksanaan pelayanan terhadap keluarga. Untuk itu perlu disusun panduan pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan (BP) yang tugas utamanya adalah melakukan identifikasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya dan membuat sistem rujukan agar keluarga tersebut bisa mendapatkan bantuan tenaga profesional.

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan salah satu wadah pelayanan kepada masyarakat, yang bisa berada di berbagai tingkatan wilayah. Tingkatan wilayah yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat kecamatan. Menurut Dithanlan (2021), hampir di seluruh kecamatan yang ada di Indonesia yang kurang lebih sejumlah delapan ribuan kecamatan, sudah memiliki Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang merupakan salah satu menu yang ada di dalam Dana Alokasi Khusus BKKBN. PPKS yang berada di Balai Penyuluhan adalah PPKS yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan menggunakan Balai Penyuluhan beserta sarana di dalamnya untuk melaksanakan pelayanan terhadap keluarga di lapangan. Apabila di daerah tersebut tidak memiliki Balai Penyuluhan bisa menggunakan fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau menyewa gedung tersendiri maupun menggunakan tempat swadaya masyarakat sendiri.

Selanjutnya untuk mekanisme pembentukan PPKS di Balai Penyuluhan maupun pembentukan PPKS di tingkatan lainnya, Anda dapat membaca lebih lengkap pada Panduan Pelayanan PPKS yang disusun oleh Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, BKKBN.

E. Rangkuman

Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan kelompok kegiatan di masyarakat sebagai wadah komunitas keluarga Lansia dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dalam rangka mewujudkan Lansia Tangguh. Sasaran BKL meliputi keluarga Lansia dan Lansia dengan wilayah sasaran tingkat dusun dan/atau rukun warga. Pembentukan BKL dapat dilakukan oleh Penyuluh KB, PLKB, IMP dan/atau bersama mitra kerja dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 2 (dua) orang Kader.

Tahapan Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), antara lain:

1. melakukan pemetaan wilayah dan mengkompilasi data kependudukan yang berkaitan dengan kelanjutusiaan dari hasil penelitian dan laporan rutin;
2. melakukan pemetaan potensi, sumber daya, dan sarana yang dimiliki;
3. penggalangan kesepakatan dilaksanakan oleh Penyuluh KB/PLKB dan IMP dan/atau bersama Mitra Kerja;
4. menyusun kepengurusan Poktan BKL; dan
5. pengesahan pembentukan Poktan BKL

Adapun kegiatan utama BKL antara lain:

1. Penyuluhan, meliputi materi pembangunan Keluarga Lansia Tangguh dan materi kelanjutusiaan sesuai dengan budaya kearifan local.
2. Kunjungan rumah, merupakan pembimbingan langsung kepada Keluarga Lansia, khususnya yang tidak hadir dalam pertemuan penyuluhan selama 2 (dua) kali berturut-turut.
3. Pendampingan, merupakan kegiatan pendampingan bagi Lansia yang memiliki gangguan dan atau permasalahan yang berkaitan dengan 7 (tujuh) dimensi Lansia Tangguh dan atau pendampingan perawatan jangka panjang bagi Lansia yang memiliki gangguan status fungsional fisik, mental dan kognitif yang cenderung berkurang dengan bertambahnya usia.
4. Rujukan, merupakan kegiatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi anggota BKL.
5. Pencatatan dan pelaporan.

F. Latihan

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Jelaskan Program dan Kegiatan dari Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia!
2. Apa saja tahapan yang wajib dilakukan dalam membentuk kelompok BKL?
3. Bagaimana kegiatan perawatan lansia dilakukan oleh keluarga?
4. Jelaskan Tahapan Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)!
5. Jelaskan kegiatan utama PPKS!

G. Evaluasi Formatif

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih A, B, C, D atau E pada jawaban yang menurut Saudara paling tepat!

1. Salah satu tahapan pembentukan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), antara lain ...
 - a. membuat peta wilayah data kependudukan yang berkaitan dengan laporan rutin
 - b. melakukan pemetaan potensi, sumber daya, dan sarana yang dimiliki RT RW
 - c. penggalangan kesepakatan dilaksanakan oleh Penyuluh KB/PLKB dan IMP dan/atau bersama Mitra Kerja
 - d. menyusun laporan kepengurusan Poktan BKL
 - e. mengesahkan pembentukan Poktan BKL dengan Pusdiklat KKB

2. Berikut adalah kegiatan utama BKL yaitu ...
 - a. Penyuluhan, meliputi materi pembangunan Keluarga Lansia Tangguh dan materi *stunting*
 - b. Kunjungan wilayah lanjut usia merupakan pembimbingan langsung kepada Keluarga Lansia
 - c. pendampingan perawatan jangka pendek bagi Lansia yang memiliki gangguan status fungsional fisik, mental dan kognitif yang cenderung berkurang dengan bertambahnya usia.

- d. Rujukan merupakan kegiatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi anggota BKL
 - b. Monitoring dan Evaluasi
3. BKKBN menyelenggarakan kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang memberikan minimal delapan jenis pelayanan, meliputi hal di bawah ini, kecuali ...
- a. Pelayanan data dan informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
 - b. Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak, Keluarga Remaja dan Remaja, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Harmonis, Keluarga Lansia dan Lansia
 - c. Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - d. Pembinaan Generasi Berencana (GenRe)
 - e. Layanan Konsultasi dan Konseling Pra Nikah
4. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan salah satu wadah pelayanan kepada masyarakat, yang bisa berada di berbagai tingkatan wilayah yaitu ...
- a. tingkat provinsi
 - b. tingkat kabupaten dan kota
 - c. tingkat kecamatan
 - d. tingkat kelurahan
 - e. tingkat RT/RW
5. Materi penyuluhan Bina Keluarga Lansia sebagai berikut, kecuali ...
- a. Buku Pegangan Kader 7 Dimensi Lansia Tangguh
 - b. Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia
 - c. Media Partisipatif Lansia Tangguh (BKL Kit)
 - d. Video Youtube dan TikTok Media Partisipatif Lansia Tangguh (BKL Kit)
 - e. Mobile Apps Lansia Tangguh (Golantang)

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

- **Umpan balik**

Cocokkan hasil jawaban Evaluasi Saudara dengan rambu jawaban yang ada pada bagian akhir dari modul ini dan hitunglah jawaban yang benar. Kemudian gunakan formula seperti di bawah ini, untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara:

$$\frac{\text{Jumlah Soal yang dijawab Benar}}{\text{Jumlah Keseluruhan Soal}} \times 100\% = \text{Nilai Perolehan Peserta}$$

Skor Nilai Perolehan:

90%-100% = baik sekali

80%-89% = baik

70%-79% = cukup

60%-69% = kurang

>59% = kurang sekali

- **Tindak Lanjut**

Jika tingkat kategori penguasaan sudah baik, maka lanjutkanlah latihan dengan menerapkan pola diskusi dengan teman Saudara. Tetapi bila penguasaan Saudara masih dalam tingkat kategori cukup, maka cobalah mempelajari ulang seluruh materi Bab ini hingga penguasaan Saudara pada test formatif berada pada kategori Baik.

BAB VI

PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KELUARGA

*Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan pemberdayaan ekonomi dan keluarga*

A. Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, perlu dilakukan upaya pemberdayaan sektor riil, khususnya melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini mengingat UMKM merupakan salah satu pemain penting bagi perekonomian nasional. Sebagai pemain penting jalannya perekonomian, UMKM memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap kehidupan perekonomian bangsa, yaitu memperluas lapangan pekerjaan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di suatu daerah, mengurangi pengangguran, meningkatkan kreatifitas, penyumbang terbesar PDB (Produk Domestik Bruto), solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah dan menambah pendapatan asli daerah (PAD).

BKKBN melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sebagai komitmen dalam melaksanakan salah satu fungsi keluarga, yaitu fungsi ekonomi agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga dilaksanakan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang merupakan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga, terutama keluarga akseptor KB dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia, Sejahtera.

UPPKA diharapkan dapat menjadi wadah untuk dapat menumbuhkan minat, semangat, dan keterampilan keluarga dalam bidang usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Penyelenggaraan kegiatan

usaha ekonomi produktif diarahkan untuk jenis usaha yang mempunyai prospek masa depan dan menguntungkan dengan mempertimbangkan: bahan baku yang mudah di dapat, kemampuan dan minat, sarana dan prasarana usaha, proses produksi, serta kebutuhan dan daya beli masyarakat.

Penyelenggaraan pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri – sendiri maupun bersama-sama, melalui pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, serta koordinasi dan pengendalian yang dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha mikro/kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Kegiatan pengembangan usaha meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendataan, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil
2. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil
3. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan usaha
4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Adapun pengembangan UMKM dilakukan dengan:

1. Mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan
2. Melakukan usaha secara efisien
3. Mengembangkan inovasi dan peluang pasar
4. Memperluas akses pemasaran
5. Memanfaatkan teknologi
6. Meningkatkan kualitas produk.

B. Strategi Pemberdayaan Usaha

Strategi pemberdayaan usaha kecil tidak bisa lepas dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM yang ada untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktivitas, melalui:

1. Sosialisasi

Sosialisasi biasanya dapat dilakukan melalui komunikasi antarpribadi, komunikasi dengan menggunakan media-massa, atau penggunaan forum media (penggabungan antara media massa dan media antarpribadi). Komunikasi antar pribadi terdiri dari percakapan, kunjungan, pertemuan, diskusi, dan lain-lain. Komunikasi dengan menggunakan media-massa seperti cetak, gambar, atau multi-media. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan wawasan bagi pemula yang berminat berwirausaha. Selain itu juga untuk membekali mereka sebagai calon wirausahawan dengan kiat-kiat memasuki dunia wirausaha, strategi memulai wirausaha, manajemen wirausaha, semangat dari wirausaha, manajemen keuangan, keterampilan yang harus dimiliki, membangun *teamwork* yang baik, dan bagaimana memulai bisnis di kalangan pemula. Sehingga mereka memiliki potensi wirausaha yang maksimal, tanpa harus merasa kurang percaya diri dan takut dengan resiko kegagalan.

2. Pengembangan Usaha

Proses pengembangan memusatkan pada pembelajaran berkesinambungan, pertumbuhan dan perubahan, yang membawa hasil dalam pembangunan keterpenuhan kebutuhan sumber daya internal seseorang. Pengembangan mengarahkan secara langsung atau tidak langsung energi dan keinginan untuk meningkatkan motivasi, mencapai tujuan, dan memaksimalkan potensi. Dengan kata lain, pengembangan merupakan memberdayakan orang dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan diri, dan perbaikan kinerja.

Telah diketahui secara luas bahwa untuk meraih keberhasilan, individu atau kelompok memerlukan motivasi yang tinggi dan dorongan untuk memulai bisnis sampai meraih

keberhasilan. Hal ini dicerminkan, misalnya, bagaimana dari ketangguhan mereka dalam menghadapi rintangan yang menghalangi, bagaimana mereka mencari informasi dan bagaimana mereka bersikap terhadap berbagai peluang yang ada. Indikator tambahan adalah komitmen dan perilaku kerja mereka.

Fasilitasi pengembangan usaha di bidang produksi dan pengolahan, dilaksanakan dengan: a) meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan; b) meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan; c) memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan. d) menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.

Fasilitasi pengembangan usaha di bidang pemasaran, dilaksanakan dengan: a) melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; b) meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; c) menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar; d) mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi; e) memasarkan produk; f) menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran; g) menyediakan rumah dagang dan promosi; h) memberikan peluang pasar.

Fasilitasi pengembangan usaha di bidang permodalan meliputi pemberian dan pemenuhan fasilitas UMKM baik didalam bentuk pendanaan maupun dalam bentuk fisik. Pemenuhan fasilitas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas UMKM yang ada sehingga mampu bersaing secara lokal maupun internasional melalui pasar bebas.

Fasilitasi sumberdaya yang langsung akan mempengaruhi kinerja usaha tersebut, meliputi modal, uang, tempat usaha, bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja. Ketersediaan infrastruktur (seperti listrik, telepon, jalan) dan layanan pendukung juga sangat penting. Keterbatasan modal perlu dilakukan penyeimbangan "uang masuk" dan "uang keluar" ini adalah sebuah perjuangan, terutama ketika mencoba melakukan perluasan usaha. Seperti tidak dapat membeli bahan baku, mesin, atau persediaan

semurah perusahaan besar, jika biaya produksi per unit lebih tinggi untuk usaha kecil, maka kesulitan pemasarannya. Usaha kecil sangat rentan jika produk tidak laku, atau jika salah satu pasarnya pindah ke produsen lain atau jika produk lamanya tiba-tiba menjadi ketinggalan zaman.

Fasilitasi pengembangan usaha di bidang sumber daya manusia, dilaksanakan dengan: a) memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; b) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; c) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi; d) menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan; e) menyediakan modul manajemen; f) menyediakan tempat magang, studi banding, dan konsultan

Fasilitasi pengembangan usaha di bidang teknologi, dilaksanakan dengan: a) meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu; b) meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; c) Memberikan insentif kepada usaha yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup; d) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; e) meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standardisasi teknologi; f) menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha; g) menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang teknologi; h) memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual.

3. Kemitraan

Kemitraan UMKM dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip Kemitraan meliputi prinsip: a. saling membutuhkan; b. saling mempercayai; c. saling memperkuat; dan d. saling menguntungkan. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

4. Perizinan

UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha untuk UMKM diberikan dalam bentuk: a. surat izin usaha; b. tanda bukti pendaftaran; atau c. tanda bukti pendataan. Surat izin usaha diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Koordinasi dan Pengendalian

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan UMKM yang tangguh dan mandiri. Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap: a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan Iklim Usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan; b. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; c. program pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan; dan d. penyelenggaraan Kemitraan usaha.

C. Rangkuman

Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKA merupakan upaya untuk membangun masyarakat ke arah ekonomi produktif. Dengan adanya kelompok usaha kecil diharapkan masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Setelah masyarakat mengetahui akan

pentingnya KB, maka masyarakat disadarkan untuk berwirausaha guna menambah penghasilannya melalui kelompok usaha kecil.

Kegiatan pemberdayaan terhadap kelompok UPPKA diarahkan agar para anggota kelompok yang terlibat mempunyai motivasi yang tinggi dalam melakukan dan mengembangkan usaha, dapat mengatasi masalah dan tantangan pasar, menemukan cara berwirausaha yang efektif, memberikan bantuan dan modal serta berupaya agar usaha yang dijalankan dapat terus meningkat. Pengetahuan dan keterampilan anggota dalam berwirausaha mutlak diperlukan, oleh karena itu belajar dari pengalaman atau belajar dari yang ahli dibidangnya tidak boleh berhenti, sehingga usaha yang dijalankan akan tetap eksis.

D. Latihan

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Jelaskan yang dimaksud dengan UPPKA!
2. Mengapa pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKA penting dilakukan?
3. Sebutkan langkah-langkah dalam strategi pemberdayaan usaha yang dapat dilakukan!
4. Bagaimana upaya untuk memberdayakan kelompok UPPKA saat ini?
5. Bagaimana memfasilitasi usaha di bidang teknologi yang diharapkan oleh UPPKA?

E. Evaluasi Formatif

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih A, B, C, D atau E pada jawaban yang menurut Saudara paling tepat!

1. Singkatan dari UPPKA adalah ...
 - a. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
 - b. Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga Akseptor
 - c. Usaha Pemberdayaan Pendapatan Keluarga Akseptor
 - d. Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
 - e. Usaha Pemerataan Pendapatan Keluarga Akseptor

2. Pengembangan UMKM dilakukan dengan cara di bawah ini antara lain ...
 - a. Mencari investor bank untuk pemodalan
 - b. Melakukan usaha secara paralel
 - c. Mengembangkan kreatifitas pasar
 - d. Memperluas jaringan investor
 - e. Memanfaatkan teknologi untuk kualitas produk

3. Fasilitasi pengembangan usaha di bidang sumber daya manusia, dilaksanakan dengan ...
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kemandirian usaha
 - b. meningkatkan keterampilan menjual
 - c. membentuk dan mengembangkan barang dan jasa
 - d. menyediakan tenaga kerja padat karya
 - e. menyediakan tempat magang, studi banding, dan konsultan

4. Fasilitasi pengembangan usaha di bidang teknologi, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut ...
 - a. meningkatkan kemampuan di bidang produksi

- b. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi terbaru
 - c. Memberikan insentif kepada usaha yang menerapkan teknologi terkini
 - d. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi
 - e. meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standardisasi tenaga kerja
5. Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM meliputi ...
- a. penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap dasar peraturan, program pengembangan dan penyelenggaraan usaha
 - b. aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan
 - c. program pengembangan usaha yang diselenggarakan BKKBN
 - d. program pengembangan di bidang Pembiayaan Asuransi
 - e. penyelenggaraan investasi dalam dan luar negeri

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Arah kebijakan dan strategi Kedeputian Bidang KSPK adalah sebagai berikut: 1) Penguatan pemahaman 8 Fungsi Keluarga; 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga; 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan Kehidupan Keluarga bagi remaja; 4) Peningkatan Kemandirian ekonomi keluarga; 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan; 6) Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

Pengukuran sasaran kegiatan maka ditetapkan keluaran/output dari masing-masing sasaran kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Pembangunan Keluarga sebagai berikut: 1) Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter; 2) Peningkatan kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter; 3) Pengembangan karakter remaja yang berkualitas; 4) Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga; 5) Peningkatan kualitas hidup keluarga rentan melalui keluarga yang mengakses PPKS; 6) Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga.

Pembangunan Keluarga melalui Kedeputian Bidang KSPK berkontribusi dalam terwujudnya visi BKKBN “mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mewujudkan tercapainya Indonesia maju yang Berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, dengan misi menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup,

dengan tujuan akhir mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.

B. Tes Sumatif

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih A, B, C, D atau E pada jawaban yang menurut Saudara paling tepat!

1. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembangunan keluarga Indonesia diantaranya ...
 - a. Belum optimalnya pengetahuan remaja tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
 - b. Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (generasi milenial dan generasi zilenial)
 - c. Kurangnya pemahaman lansia tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga
 - d. Perubahan struktur ekonomi dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga
 - e. Masih lemahnya kebersihan diri dan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia

2. . Di Indonesia, angka Prevalensi *stunting* cenderung tinggi pada yakni...
 - a. 35,2 % pada tahun 2013. Namun selajutnya angka tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut yakni 30,8% (2018), 26,7 % (2019) dan pada tahun 2021 menjadi 23,4 % (Data SSGI, 2021).
 - b. 38,2 % pada tahun 2013. Namun selajutnya angka tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut yakni 38,8% (2018), 27,7 % (2019) dan pada tahun 2021 menjadi 22,4 % (Data SSGI, 2021).

- c. 36,2 % pada tahun 2013. Namun selanjutnya angka tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut yakni 20,8% (2018), 27,7 % (2019) dan pada tahun 2021 menjadi 23,4 % (Data SSGI, 2021).
 - d. 37,2 % pada tahun 2013. Namun selanjutnya angka tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut yakni 30,8% (2018), 27,7 % (2019) dan pada tahun 2021 menjadi 24,4 % (Data SSGI, 2021).
 - e. 38,2 % pada tahun 2013. Namun selanjutnya angka tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut yakni 39,8% (2018), 27,7 % (2019) dan pada tahun 2021 menjadi 44,4 % (Data SSGI, 2021).
3. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada ...
- a. generasi yang selanjutnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan
 - b. generasi keluarga millennial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan asupan gizi
 - c. generasi lansia yang tidak tangguh dalam memenuhi harapan hidupnya yang panjang
 - d. generasi berencana yang tidak mampu bersaing dalam dunia global
 - e. generasi baduta dan balita yang tidak dapat tumbuh kembang secara optimal
4. Delapan fungsi keluarga berdasarkan Peraturan Pemerintah No: 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga adalah ...
- a. (1) Fungsi Religi; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Kesehatan Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Peningkatan Ekonomi Keluarga, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan
 - b. 1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan

- c. 1) Fungsi Beragama; (2) Fungsi Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Proteksi; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Lingkungan
 - d. 1) Fungsi Religi; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Proteksi; (5) Fungsi Kesehatan Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan
 - e. 1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan
 - f. 1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Sayang; (4) Fungsi Perawatan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Masyarakat; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pemeliharaan Lingkungan
5. Kondisi kesehatan ibu dan anak berdasarkan data SUPAS 2015 dan SDKI 2017 menunjukkan ...
- a. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 300 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 25 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017)
 - b. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 405 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017).
 - c. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017)
 - d. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 505 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 44 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017)

- e. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 1.000.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2017)
6. Singkatan dari UPPKA adalah ...
- a. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
 - b. Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga Akseptor
 - c. Usaha Pemberdayaan Pendapatan Keluarga Akseptor
 - d. Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
 - e. Usaha Pemerataan Pendapatan Keluarga Akseptor
7. Pengembangan UMKM dilakukan dengan cara di bawah ini antara lain ...
- a. Mencari investor bank untuk pemodalan
 - b. Melakukan usaha secara paralel
 - c. Mengembangkan kreatifitas pasar
 - d. Memperluas jaringan investor
 - e. Memanfaatkan teknologi untuk kualitas produk
8. BKKBN menyelenggarakan kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang memberikan minimal delapan jenis pelayanan, meliputi hal di bawah ini, kecuali ...
- a. Pelayanan data dan informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
 - b. Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak, Keluarga Remaja dan Remaja, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Harmonis, Keluarga Lansia dan Lansia
 - c. Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - d. Pembinaan Generasi Berencana (GenRe)
 - e. Layanan Konsultasi dan Konseling Pra Nikah

9. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan salah satu wadah pelayanan kepada masyarakat, yang bisa berada di berbagai tingkatan wilayah yaitu ...
- tingkat provinsi
 - tingkat kabupaten dan kota
 - tingkat kecamatan
 - tingkat kelurahan
 - tingkat RT/RW
10. Materi penyuluhan Bina Keluarga Lansia sebagai berikut, kecuali ...
- Buku Pegangan Kader 7 Dimensi Lansia Tangguh
 - Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia
 - Media Partisipatif Lansia Tangguh (BKL Kit)
 - Video Youtube dan TikTok Media Partisipatif Lansia Tangguh (BKL Kit)
 - Mobile Apps Lansia Tangguh (Golantang)
11. Pengembangan kelompok PIK Remaja/Mahasiswa memiliki arah dan tujuan yaitu...
- Menjadikan remaja sebagai pengelola, pendidik dan konselor sebaya
 - Membentuk generasi millennial yang berencana
 - Membentuk remaja yang bebas dari pengaruh media sosial yang negatif
 - Menjadikan remaja yang mampu mendampingi keluarga Indonesia
 - Menjadikan remaja yang sadar akan TRIAD KRR
12. Program GenRe mengembangkan materi-materi diantaranya adalah ...
- Pencegahan Perkawinan Usia Anak
 - Keterampilan Hidup (*Lifeskills*)
 - Penyiapan Kehidupan Berkeluarga khususnya Pencegahan *Stunting*
 - Aplikasi Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL)
 - Pendampingan Keluarga yang Memiliki Remaja

13. Salah satu tugas kader BKB adalah ...
 - a. memberikan nasihat sesuai dengan materi yang telah ditentukan
 - b. mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya
 - c. mengadakan kunjungan desa setempat
 - d. memotivasi pengasuh untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang
 - e. membuat kegiatan besar dalam rangka melibatkan orangtua di wilayah binaan

14. Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dilaksanakan melalui kegiatan
 - a. Peningkatan Kapasitas bagi PKB dan PLKB
 - b. Sosialisasi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan bagi Ibu Hamil dan Keluarga yang memiliki anak usia sampai 2 (dua) tahun
 - c. Monitoring dan evaluasi kepada provinsi yang menjadi lokasi prioritas pencegahan *stunting*
 - d. Melakukan kegiatan bhakti sosial secara rutin sebulan sekali di wilayah binaannya masing-masing sebagai upaya pemantauan tumbuh kembang balita dan anak
 - e. Sosialisasi Materi Tumbuh Kembang Balita bagi Keluarga dan 1000 HPK yang memiliki anak usia sampai 6 (dua) tahun

15. Penyuluhan yang dilakukan Kader BKB secara terstruktur dan dilakukan pertemuan dalam jangka waktu ...
 - a. minimal 1 (satu) bulan sekali dengan mekanisme pelaksanaan pertemuan penyuluhan adalah waktu, tempat, dan jadwal materi penyuluhan
 - b. minimal 1 (satu) bulan sekali dengan mekanisme pelaksanaan pertemuan penyuluhan adalah materi, konsumsi, dan jadwal materi penyuluhan
 - c. minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan mekanisme pelaksanaan pertemuan

penyuluhan adalah waktu, tempat, dan jadwal materi penyuluhan

- d. minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan mekanisme pelaksanaan pertemuan penyuluhan adalah lokasi dan jadwal materi penyuluhan.
- e. minimal 6 (enam) bulan sekali dengan mekanisme pelaksanaan pertemuan penyuluhan adalah waktu dan jadwal materi penyuluhan

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. 2019. *Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program BANGGA KENCANA (SKAP) – Remaja tahun 2019*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. 2019. *Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program BANGGA KENCANA (SKAP) – Keluarga tahun 2019*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. 2020. *Rencana Strategis 2020 – 2024*. Jakarta: Deputi Bidang KSPK.
- Dithanrem, BKKBN. 2019. *Modul Pegangan bagi Fasilitator Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R): Rencanakan Masa Depanmu*. Direktorat Bina Ketahanan Remaja. Jakarta: BKKBN
- Dithanrem, BKKBN. 2019. *Buku Pembinaan Ketahanan Remaja: Memberdayakan Peran Sebaya dan Memperkuat Peran Orangtua dalam Pengasuhan di Keluarga*. Direktorat Bina Ketahanan Remaja. Jakarta: BKKBN
- Dithanlan, BKKBBN. 2019. *Buku Pegangan Kader : Lansia Tangguh dengan Tujuh Dimensi*. Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan. Jakarta: BKKBN
- Dithanlan, BKKBBN. 2018. *Buku Pedoman Perawatan Jangka Panjang (PJP)/Long Term care (LTC) Bagi Lansia Berbasis Keluarga*. Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan. Jakarta: BKKBN
- Kusumawati, Eny. 2017. *Problematika Remaja dan Faktor Yang Mempengaruhi*. Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling) Vol. 1 No.1 (Mei 2017) Online ISSN 2580–216X. Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas PGRI Madiun

Pusdiklat KKB, BKKBN. 2021. Buku Kompilasi Materi Program pembanguna Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi PKB kategori Keterampilan. Jakarta: BKKBN

Pusdiklat KKB, BKKBN. 2021. Buku Kompilasi Materi Program pembanguna Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi PKB kategori Keahlian. Jakarta: BKKBN

Yatim, Danny I. 2015. *Seri Genre – Buku 1: Siapakah Remaja Itu?*. Jakarta: BKKBN.

LAMPIRAN

Kunci Jawaban dan Pembahasan Evaluasi Formatif

BAB II

KONSEP PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA

1. Jawaban: B

Pembahasan:

Tuntutan baru bagi keluarga Indonesia saat ini adalah menghadapi keluarga muda yang didominasi oleh generasi usia millennial dan zillennial dengan segala permasalahannya yang kompleks.

2. Jawaban: D

Pembahasan:

37,2 % pada tahun 2013. Namun selajutnya angka tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut yakni 30,8% (2018), 27,7 % (2019) dan pada tahun 2021 menjadi 24,4 % (Data SSGI, 2021).

3. Jawaban: A

Pembahasan:

Perkawinan anak akan berdampak pada adanya generasi turun menurun masuk ke dalam siklus lingkaran kemiskinan

4. Jawaban: B

Pembahasan:

Delapan Fungsi Keluarga berdasarkan Peraturan Pemerintah No: 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga meliputi 1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan

5. Jawaban: C

Pembahasan:

Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017)

BAB III

PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA BALITA DAN ANAK

1. Jawaban: B

Pembahasan:

Salah satu tugas kader BKB adalah berkaitan dengan pemantauan tumbuh kembang balita dan anak

2. Jawaban: B

Pembahasan:

Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi 1000 HPK sampai anak usia balita di 2 tahun

3. Jawaban: A

Pembahasan:

Penyuluhan dilakukan oleh Kader BKB dilakukan secara struktur dalam jangka waktu 1 bulan sekali dengan memberikan jadwal, waktu, dan tempat penyuluhan

4. Jawaban: E

Pembahasan:

Kelompok BKB memiliki salah satu kegiatan penting yaitu Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan terhadap pelaksanaan operasional dan keberlangsungan Program Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak

5. Jawaban: D

Pembahasan:

Materi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan terdapat pada Modul BKB Emas yang terdiri dari: 1) Penerapan 8 Fungsi Keluarga dalam masa 1000 HPK; 2) Kesehatan fisik dan mental Ibu Hamil dan Ibu Menyusui; 3) Pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi Ibu Hamil dan Keluarga Baduta; 4) Stimulasi perkembangan anak pada masa 1000 HPK; 5) Meningkatkan peran ayah dan anggota keluarga lainnya; 6) Pengasuhan yang tanggap (cepat dan tepat) terhadap kebutuhan anak.

BAB IV

PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA REMAJA

1. Jawaban: E

Pembahasan:

Beberapa permasalahan Program Bangga Kencana terkait remaja yang masih dihadapi saat ini antara lain (SKAP, 2019):

- 6) Masih rendahnya remaja yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
- 7) Masih rendahnya indeks pengetahuan tentang Generasi Berencana
- 8) Masih rendahnya persentase remaja yang mengetahui isu kependudukan

- 9) Masih rendahnya remaja yang mendapatkan informasi program BANGGA KENCANA melalui media massa (cetak, elektronik), media luar ruang, dan media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, dan media tradisional)
- 10) Masih rendahnya remaja yang mendapatkan informasi program BANGGA KENCANA melalui tenaga lini lapangan

2. Jawaban: A

Pembahasan:

Pengembangan kelompok PIK Remaja/ Mahasiswa memiliki arah dan tujuan adalah menjadikan remaja sebagai pengelola, pendidik, dan konselor sebaya

3. Jawaban: B

Pembahasan:

Program GenRe dikembangkan materi-materi diantaranya adalah Kesehatan Reproduksi Remaja, Life Skill, Penyiapan Kehidupan Berkeluarga, serta Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

4. Jawaban: B

Pembahasan:

Kusumastuti (2017) menjelaskan bahwa berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh remaja disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) kurangnya kasih sayang orang tua.
- 2) kurangnya pengawasan dari orang tua.
- 3) pergaulan dengan teman yang tidak sebaya.
- 4) peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif.
- 5) tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah.
- 6) dasar-dasar agama yang kurang
- 7) tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya
- 8) kebebasan yang berlebihan serta masalah yang terpendam

5. Jawaban: A

Pembahasan:

BKKBN mengembangkan Program Genre berbasis pada TRIAD KRR HIV dan AIDS serta NAPZA, proram pendidikan keterampilan hidup (*Life Skills Education*), penyetaraan gender dan keterampilan dalam mengadvokasi serta KIE, Pelaksana program Genre lebih diarahkan kepada PIK-R sebagai konselor sebaya

BAB V

PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA LANSIA RENTAN

1. Jawaban: C

Pembahasan:

Tahapan pembentukkan Kelompok BKL melakukan pemetaan wilayah dan mengkompilasi data kependudukan yang berkaitan dengan kelanjutusiaan dari hasil penelitian dan laporan rutin; melakukan pemetaaan potensi, sumber daya, dan sarana yang dimiliki; penggalangan kesepakatan dilaksanakan oleh Penyuluh KB/PLKB dan IMP dan/atau bersama Mitra Kerja; menyusun kepengurusan Poktan BKL; dan pengesahan pembentukan Poktan BKL

2. Jawaban: D

Pembahasan:

Salah satu kegiatan utama BKL adalah melakukan rujukan yang mengarah pada pemberian solusi terhadap permasalahan keluarga yang memiliki lansia khususnya pada anggota BKL

3. Jawaban: D

Pembahasan:

BKKBN menyelenggarakan kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang memberikan minimal delapan jenis pelayanan meliputi:

- 1) Pelayanan data dan informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga,
- 2) Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak,
- 3) Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja,
- 4) Konsultasi dan Konseling Pra Nikah,
- 5) Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
- 6) Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis,
- 7) Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia,
- 8) Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

4. Jawaban: C

Pembahasan:

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan salah satu wadah pelayanan kepada masyarakat, yang bisa berada di berbagai tingkatan wilayah kecamatan

5. Jawaban: B

Pembahasan:

Materi penyuluhan Bina Keluarga Lansia sebagai berikut:

- e. Buku Pegangan Kader 7 Dimensi Lansia Tangguh
- f. Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia
- g. Media Partisipatif Lansia Tangguh (BKL Kit)
- h. Video Tutorial Media Partisipatif Lansia Tangguh (BKL Kit)
- e. Mobile Apps Lansia Tangguh (Golantang)

BAB VI

PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KELUARGA

1. Jawaban: A

Pembahasan:

UPPKA singkatan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor

2. Jawaban:

Pembahasan:

Pengembangan UMKM dilakukan dengan cara:

- 1) Mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan
- 2) Melakukan usaha secara efisien
- 3) Mengembangkan inovasi dan peluang pasar
- 4) Memperluas akses pemasaran
- 5) Memanfaatkan teknologi
- 6) Meningkatkan kualitas produk.

3. Jawaban: E

Pembahasan:

Salah satu kegiatan fasilitasi pengembangan usaha di bidang sumber daya manusia, dilaksanakan dengan menyediakan tempat magang, melakukan studi banding, dan menyediakan jasa konsultasi

4. Jawaban: D

Pembahasan:

Salah satu kegiatan fasilitasi pengembangan usaha di bidang teknologi, dilaksanakan dengan cara meningkatkan kerjasama dan alih teknologi

5. Jawaban: A

Pembahasan:

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap dasar peraturan, program pengembangan dan penyelenggaraan usaha.

**KUNCI JAWABAN
TES SUMATIF**

Nomor	Jawab	Nomor	Jawab	Nomor	Jawab
1	B	6	A	11	A
2	D	7	E	12	B
3	A	8	D	13	B
4	B	9	C	14	B
5	C	10	D	15	A



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Jl. Permata No.1 Halim Perdanakusuma, Jakarta

BERENCANA ITU KEREN

 @BKKBNofficial

